

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN
(TASKAP)**

**REVITALISASI PENDEKATAN SOSIAL BUDAYA GUNA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA
DALAM RANGKA
MENUJU INDONESIA EMAS 2045**

OLEH :

**NAMA : MUSMULYADI. Z, S.IP.,
NOMOR PESERTA : 063**

**PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMHANNAS RI
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musmulyadi, Z. S. IP.,

Pangkat : Kolonel Inf

Jabatan : Pamen Mabasad

Instansi : TNI AD

Alamat : Jl. Sederhana 7 No. 160 Cijantung, Jakarta Timur.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) yang saya tulis adalah asli;

b. Apabila ternyata sebagian atau seluruh tulisan TASKAP ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan;

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 15 Agustus 2024

Musmulyadi, Z. S. IP.,

Peserta No. 063



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Musmulyadi, Z. S.IP,.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI

Judul Taskap : REVITALISASI PENDEKATAN SOSIAL BUDAYA GUNA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PAPUA DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Taskap tersebut di atas telah ditulis "**sesuai/tidak sesuai**" dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2024 karena itu "**layak/tidak layak**" dan "**disetujui/tidak disetujui**" untuk diuji.

"coret yang tidak diperlukan"

Jakarta, 15 Agustus 2024

Tutor Taskap,



Dra. Dwi Hernuningsih, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb, Salam sejahtera untuk kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penulis sebagai peserta dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI tahun 2024, telah menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia berupa Kertas Karya Ilmiah Perorangan (TASKAP) dengan judul: **“Revitalisasi Pendekatan Sosial Budaya Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua Dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Penulisan Taskap ini merupakan salah tugas dalam menyelesaikan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lemhannas RI Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI tanggal 28 Maret 2024

Perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Gubernur LEMHANNAS RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di LEMHANNAS RI tahun 2024. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Pembimbing atau Tutor TASKAP Ibu Dra. Dwi Hernuningsih, M.Si dan Tim Penguji TASKAP, Rekan-Rekan PPRA LXVI, Istri dan anak-anakku yang setia menemani serta semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung sampai terselesaikannya TASKAP ini sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan LEMHANNAS RI.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan kualitas TASKAP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya masukan yang membangun guna penyempurnaan naskah TASKAP ini sangat penulis harapkan. Dan besar harapan penulis, semoga TASKAP ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan tulisan ilmiah dengan tema terkait atau referensi rumusan kebijakan terkait Papua.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua untuk terus memberikan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang amat kita cintai ini.

Sekian dan Terimakasih, Wassalamu'alaikum wr.wb.

Jakarta, 15 Agustus 2024

Musmulyadi, Z, S. IP,.

Peserta No. 063



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 6 |
| 3. Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 4. Ruang Lingkup dan Sistematika | 8 |
| 5. Metode dan Pendekatan..... | 9 |
| 6. Pengertian..... | 10 |
| BAB II LANDASAN PEMIKIRAN..... | 14 |
| 7. Umum..... | 14 |
| 8. Peraturan Perundang-Undangan | 14 |
| 9. Data dan Fakta..... | 17 |
| 10. Kerangka Teoritis | 30 |
| 11. Lingkungan Strategis..... | 33 |
| BAB III PEMBAHASAN | 38 |
| 12. Umum..... | 38 |
| 13. Kondisi Pembangunan dengan pendekatan Sosial Budaya Masyarakat Papua Saat Ini..... | 39 |
| 14. Faktor Penghambat Dan Pendorong Dalam Pendekatan Sosial Budaya Yang Telah Dilakukan..... | 50 |
| 15. Revitalisasi Pendekatan Sosial Budaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua Dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045..... | 57 |
| BAB IV PENUTUP..... | 79 |
| 16. Kesimpulan..... | 79 |
| 17. Rekomendasi | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada tahun 2045 akan memperingati 100 tahun kemerdekaan yang dijadikan sebagai harapan “Indonesia Emas 2045 dengan visi menjadi negara berdaulat, maju dan berkelanjutan¹. Dalam Pencapaian Indonesia Emas 2045 tersebut sangat dibutuhkan peran dari Pemerintah Pusat dan Daerah dengan mengembangkan seluruh aspek yang dimilikinya berupa kondisi Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, kondisi yang dinamis dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan kondisi pertahanan dan keamanan di wilayahnya masing-masing. Dapat dilihat dari perkembangan kondisi nasional daerah daerah Indonesia saat ini yang mulai mengembangkan dirinya untuk menuju pencapaian tersebut. Termasuk Pulau Papua yang saat ini yang mulai diharapkan berkembang menuju Indonesia Emas 2045 dengan membentuk 6 (enam) Propinsi dari 2 (dua) propinsi.

Papua yang memiliki luas sekitar 421.981 kilo meter persegi atau 3,5 kali lebih besar dari pada Pulau Jawa yang terdiri dari daerah pegunungan dan pantai dengan keberadaan 7 suku adat besar, 250 etnis dengan kebiasaan-kebiasaan, bahasa-bahasa². Karakteristik yang beragam dari masyarakat Papua ditunjukkan oleh banyaknya suku dan budaya, namun memiliki suatu kesamaan dalam penghormatan terhadap agama dan tokoh-tokohnya serta tingkat partisipasi masyarakat dalam tiap kelompok hukum adat juga cukup tinggi, sehingga sangat berpotensi untuk menjadi modal pembangunan masyarakatnya.

Selain memiliki kekayaan budaya yang luar biasa besarnya, Papua juga memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan mengagumkan, baik pertambangan, pangan, perikanan dsb. Namun semua kekayaan yang dimiliki Papua tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, seolah-olah kekayaan yang ada hanya fatamorgana, sementara masalah

¹ <https://www.bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045> ; Diakses pada 24 Maret 2024

² Menurut Jared Diamond, Papua menempati posisi di ekstrim tertinggi keanekaragaman bahasa, sebab dalam wilayah yang hanya seluas 780.000 kilo meter persegi, Papua memiliki 1000 (seribu) bahasa asli, yang berarti ada satu bahasa per 780 kilo meter persegi di wilayah Papua.

demikian masalah dari berbagai aspek terus menjadi momok dan anomali bagi masyarakat Papua sebagai pemilik sah dari warisan kekayaan alam dan budaya yang dikandung tanah air mereka sendiri. Berbagai data statistik dan sumber-sumber lainnya menunjukkan adanya fakta yang bertolak belakang antara wilayah Papua yang begitu kaya dengan kondisi masyarakat yang menghuninya.

Kondisi kemampuan yang dimiliki tanah Papua tersebut diatas sangatlah berpotensi besar dalam perekonomian Indonesia, namun sejak bergabungnya Papua kembali ke NKRI melalui Pepera tahun 1969 dan didukung oleh Resolusi PPB No. 2504 yang ditetapkan Sidang Umum PBB, 19 November 1969 tentang pengakuan terhadap hasil Pepera dapat dikatakan permasalahan Papua belum terselesaikan sampai sekarang.

Pembangunan dan penyelesaian permasalahan di Papua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sudah dilakukan sejak jaman orde baru dalam pemerintahan Presiden Soeharto yang lebih menitikberatkan pada pendekatan Militer dan Keamanan dengan menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer dalam mengetasi separatisme yang terus bermunculan. Namun Pemerintah saat itu juga melakukan pendekatan dalam bentuk sosial budaya dalam bentuk homogenisasi budaya dan kontrol terpusat dengan pemberdayaan dan pengakuan terhadap identitas kultural masyarakat Papua. Hal ini dapat dilihat dari adanya Transmigrasi dan Integrasi Budaya, Pemerintah Orde Baru juga menggalakkan program transmigrasi, yang bertujuan untuk memindahkan penduduk dari daerah-daerah padat penduduk seperti Jawa, Bali, dan Sumatra ke Papua. Program ini dimaksudkan untuk memperkuat integrasi nasional dan meningkatkan pembangunan di Papua. Namun, program ini menciptakan ketegangan sosial-budaya karena penduduk asli Papua merasa terpinggirkan oleh kehadiran pendatang yang berbeda budaya dan menguasai sektor-sektor ekonomi strategis. Pada jaman orde baru adanya Pembangunan dan Modernisasi dimana Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Papua, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan mengintegrasikan Papua ke dalam kerangka ekonomi nasional. Namun, dalam prosesnya, banyak kebijakan yang tidak sensitif terhadap kearifan lokal dan budaya masyarakat Papua. Asimilasi Budaya dan Nasionalisme, Pemerintah mendorong asimilasi budaya dengan mempromosikan simbol-simbol

nasionalisme dan identitas budaya Indonesia, seperti penggunaan bahasa Indonesia dan pemahaman tentang Pancasila. Nilai-nilai lokal masyarakat Papua seringkali tidak dihargai atau dipinggirkan, yang berujung pada resistensi dari masyarakat adat. Serta adanya Dialog Sosial Terbatas dengan masyarakat adat Papua mengenai keinginan mereka sering kali tidak mendapat tempat dalam kebijakan Orde Baru. Suara-suara lokal yang kritis terhadap pemerintah dipandang sebagai ancaman terhadap integrasi nasional dan sering kali direpresi.

Pendekatan dalam Orde Baru tersebut dengan bertujuan untuk memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Papua dengan mendatangkan penduduk dari daerah lain sehingga diharapkan menjadi suatu perkembangan yang signifikan dalam bidang Pembangunan pada awalnya cukup menjanjikan dengan adanya Pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi.

Setelah masa Orde Baru selesai, permasalahan Papua pun belum terlihat adanya tanda-tanda terselesaikan. Masih terdapat adanya gangguan stabilitas keamanan yang terjadi secara fluktuatif dan bahkan meningkat serta tingkat kesejahteraan yang terendah dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 yang dihitung berdasarkan empat indikator, yakni Umur Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pendapatan per Kapita per Tahun yang Disesuaikan, menunjukkan Provinsi Papua berada pada peringkat terendah dari seluruh provinsi Indonesia, kemudian disusul Provinsi Papua Barat sebagai provinsi dengan IPM terendah kedua se-Indonesia.

Sementara kondisi angkatan muda di Papua, menunjukkan bahwa ada sekitar 8,33 persen pemuda di Provinsi Papua tidak dapat membaca dan menulis, sehingga dapat disimpulkan kondisi pemuda di wilayah Papua berada pada tingkat buta huruf yang sangat besar. Berdasarkan publikasi BPS, wilayah Papua yang mencakup Papua dan Papua Barat (sudah termasuk daerah otonomi baru) masih menanggung beban tingkat buta huruf yang cukup besar.

Selain angka buta huruf, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), mengacu pada Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2023, tercatat Provinsi Papua dan Papua Barat (sudah mencakup 3 wilayah otonomi baru) berada pada tingkat kemiskinan ekstrim tertinggi secara nasional. Selain itu, keterwakilan politik legislatif OAP juga sangat memprihatinkan, sebab justeru OAP merupakan

minoritas dalam jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di seluruh wilayah Papua.

Selain persolan-persoalan Papua di atas, di sisi lain tingkat kekerasan di wilayah Papua juga terus meningkat tiap tahunnya, merujuk laporan dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Edisi 31 Maret 2022³, sejak 2010 frekuensi dan intensitas kekerasan di Papua mengalami fluktuasi dan kenaikan cukup tajam. Intensitas paling tinggi terjadi pada periode 2019-maret 2022, tercatat berjumlah 348 kasus dengan korban berjumlah 2118 jiwa di mana terjadi peningkatan signifikan baik dari sisi frekuensi dan jumlah korban maupun variasi motif dan jenis tindak kekerasan.

Adapun pendekatan sosial budaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui program-program dari Kementerian dan Lembaga baik dibidang Pendidikan, Kesehatan maupun Kebudayaan. Beberapa Program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)⁴, Sekolah Papua Pintar⁵, Pemberian Beasiswa melalui dana Otsus dsb. Dalam bidang kesehatan, program Kemenkes sudah cukup banyak yang dilaksanakan di Papua. Namun masih ada 2.769 anak balita dari total 23.548 anak balita yang diukur di Provinsi Papua hingga September 2023 terdeteksi mengalami tengkes. Prevalensi tertinggi tercatat di Kabupaten Mamberamo Raya, Supiori, dan Sarmi⁶.

Berbagai persoalan di tanah Papua yang dirangkum di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah Papua bukan hanya soal separatis, konflik dan kekerasan serta ancaman disintegrasi, Masalah Papua sangat kompleks di berbagai segi, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, hingga persoalan keamanan. Sehingga akar konflik yang terjadi di Papua pun tidak tunggal, melainkan disebabkan oleh banyak faktor.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa konflik dan kekerasan yang terjadi di

³ Bambang Purwoko (*et.al*), *Tindak Kekerasan di Papua (Januari 2010 – Maret 2022)*, Edisi Maret 2022, Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2022, hlm. 6.

⁴ <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/3-ribu-lebih-siswa-papua-telah-memperoleh-beasiswa-afirmasi-pendidikan-tinggi-adik/> Diakses pada 24 Maret 2024

⁵ <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-program-indonesia-pintar-salah-satu-program-prioritas-kemdikbudristek/> Diakses pada 24 Maret 2024

⁶ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/05/2769-balita-di-papua-alami-stunting-program-pencegahan-ditingkatkan> Diakses pada 24 Maret 2024

Papua, yang oleh beberapa kalangan disebut sebagai krisis nasionalisme, sebab ada upaya memisahkan diri atau membentuk pemerintahan sendiri, sebenarnya hulunya adalah persoalan kebudayaan dan identitas. Di mana ada pandangan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik, serta marginalisasi terhadap Orang Asli Papua. Kekerasan politik, pengerukan sumber daya alam dan pelanggaran HAM di Papua sudah terjadi bertahun-tahun. Cara-cara represif dengan mengerahkan kekuatan militer melalui operasi militer (pendekatan bidang pertahanan keamanan) yang dilakukan justru terkadang menambah luka batin masyarakat Papua akibat dampak yang ditimbulkan oleh operasi militer tersebut.

Menarik apa yang disampaikan Ernest Gellner, bahwa kehendak untuk bersatu dalam semangat nasionalisme tidak serta merta muncul saat penjajah angkat kaki dari tanah jajahannya, namun munculnya semangat bersatu justru sebagai akibat dari proses perjalanan atau perkembangan bangsa itu. Maksudnya, peran kekuasaan yang ideal serta penerimaan rakyat sangat menentukan semangat bersatu dan arah nasionalisme itu berlabuh. Sejalan dengan Gellner, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa berpalingnya semangat bersatu dalam bingkai nasionalisme kepada kehendak untuk berdiri sendiri atau menentukan nasib sendiri dalam suatu entitas negara baru, apabila dianalisis berdasarkan sosial dan budaya, realitas semacam itu bukanlah hal baru, namun proses *mimesis* (peniruan) dari hilangnya perekat bangsa akibat sikap oportunistik kekuasaan. Kepercayaan rakyat kepada penguasa semakin menurun akibat praktik kekuasaan yang tidak berpihak selama bertahun-tahun.⁷

Pada konteks Indonesia, boleh jadi menjadi contoh bijak di mana nasionalisme atau keinginan untuk bersatu tidak berjalan sesuai kehendak para penggagasnya. Pada latar sosial, rakyat adalah objek proses integrasi sosial, bukan subjek yang menempatkan dirinya sebagai aktor sosial yang bergerak berdasarkan kondisi dan kebutuhan sosialnya. Sedangkan pada latar politik, mereka hanyalah objek kekuasaan lewat kebijakan politik. Kesan sebagai pihak yang dimobilisasi lebih lekat ketimbang sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan pilihan rasionya sehingga masyarakat pada intinya mempunyai hak untuk mengembangkan kemampuannya.

Kaitannya dengan pengembangan kebudayaan dan identitas dalam

⁷ Fahri Hamzah, *Negara, Pasar dan Rakyat*, (Jakarta: FAHAM, 2011), hlm. 92

kebijakan pembangunan, merupakan hal yang perlu sebagai alternatif menyelesaikan masalah di Papua dengan dimulai dari memaksimalkan potensi kebudayaan yang menjadi identitas kebangsaannya. Memaksimalkan dan mengembangkan potensi budaya Papua, akan menjadi jalan bagi semakin kuatnya jati diri orang Papua, serta mendorong terberdayanya orang Papua, sebagai modal bagi pembangunan masyarakat Papua yang berkelanjutan. Sebab hal paling utama dari suatu pembangunan masyarakat adalah Sumber Daya Manusia (SDM), jika masyarakat Papua kehilangan jati diri dan memudar kebudayaannya, yang itu berarti mengaburkannya identitas asli orang Papua, maka akan untuk membangun Papua di segala bidang akan sangat berjalan secara baik. Maka memberdayakan masyarakat Papua dengan mengembangkan potensi kebudayaannya, merupakan pijakan yang harus sebelum membangun masyarakat Papua ke arah yang lebih maju sehingga tercapai peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, hal ini didukung dengan adanya kebijakan tentang otonomi khusus yang sudah diatur oleh undang – undang.

Dengan adanya kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban yang cukup memprihatinkan serta kondisi Sumber Daya Manusia yang cukup rendah maka diperlukan suatu pendekatan ataupun mengoptimalkan proses pendekatan sosial budaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah Papua yang didukung dengan pendekatan Pertahanan Keamanan melalui suatu Revitalisasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Papua dalam rangka menuju "Indonesia Emas 2045".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta fakta kondisi tersebut diatas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah ***“Bagaimana revitalisasi pembangunan dengan pendekatan sosial budaya dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua guna menuju Indonesia Emas 2045?.”***

Dalam rumusan masalah tersebut diatas kata kunci pertama adalah pendekatan sosial budaya, kedua adalah kesejahteraan dan ketiga adalah Indonesia Emas 2045. Dari kata kunci pertama tentang pendekatan Sosial Budaya merupakan pendekatan alternatif lain dari pendekatan bidang Hankam yang sudah dilakukan secara terus menerus sampai saat ini. Sedangkan arti dari kesejahteraan

merupakan kesejahteraan lahir dan batin yang selalu didengungkan dalam tujuan nasional Indonesia. Untuk Indonesia Emas merupakan cita cita nasional yang akan menjadi tujuan nasional yang seutuhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dari rumusan masalah tersebut diatas untuk masyarakat Papua, penulis menjadikan rumusan ini berdasar kata kunci pertama yaitu pendekatan sosial budaya yaitu Kesehatan dan pendidikan serta kondisi psikologis yang selalu melekat dalam harkat hidup masyarakat pada umumnya guna meningkatkan sumber daya Masyarakat papua yang berkelanjutan.

Pertanyaan rumusan masalah di atas, dirinci dengan beberapa pertanyaan pokok berikut:

- a. Bagaimana kondisi Pembangunan dengan pendekatan Sosial Budaya Masyarakat Papua saat ini?
- b. Apa faktor penghambat dan pendorong dalam pendekatan sosial budaya yang telah dilakukan?
- c. Bagaimana merevitalisasi pendekatan Sosial Budaya seiring dengan pendekatan bidang pertahanan dan keamanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana alternatif pembangunan masyarakat Papua demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera sebagai modal menuju Indonesia Emas 2045. Pada Taskap ini akan dijelaskan bagaimana pendekatan sosial-budaya perlu menjadi alternatif yang direvitalisasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai modal menuju Indonesia Emas 2045.

b. Tujuan

Tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan sumbangan ide dan gagasan tentang bagaimana pendekatan sosial-budaya perlu menjadi alternatif yang direvitalisasi demi mewujudkan kesejahteraan

masyarakat Papua sebagai modal menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu tujuan lainnya adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan politik yang mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua melalui revitalisasi pendekatan sosial-budaya, sebagai modal menuju Indonesia Emas 2045.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Dalam penulisan Taskap ini, ruang lingkup pembahasan pada pendekatan Sosial Budaya yang menyangkut bidang Pendidikan, Kesehatan dan Spritual untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dalam rangka menuju Indonesia Emas 45. Pembahasan dan pendekatan sosial dilihat dari beberapa aspek yang dilihat pada kondisi psikologis Masyarakat Papua dan indikator kesejahteraan rakyat Papua.

b. Sistematika

Penulisan Taskap ini mengikuti strandar sistematika penulisan dari Lemhannas RI, sebagai berikut:

1) **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan serta pengertian yang berisi hal-hal atau istilah-istilah yang dalam Taskap ini yang dirasa perlu difenisikan untuk menyamakan persepsi agar memudahkan memahami pembahasan dalam Taskap ini.

2) **BAB II: LANDASAN PEMIKIRAN**

Bab ini berisi kerangka teoritis yang diperlukan untuk memudahkan pembahasan dalam taskap ini serta sebagai pijakan untuk memahami pembahasan serta pemecahan masalah dalam Taskap ini.

3) **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penulisan Taskap ini, yang berisi hasil kajian mengenai data dan fakta serta berbagai hal untuk menjawab pertanyaan kajian dalam rumusan masalah.

4) **BAB IV: PENUTUP**

Pada bagian penutup ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berisi poin-poin jawaban dalam penelitian ini dan rekomendasi berisi saran-saran atau masukan-masukan bagi pemangku kebijakan dalam merevitalisasi pendekatan sosial budaya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Papua demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

5. **Metode dan Pendekatan**

a. **Metode**

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau kepustakaan melalui studi dokumen dan pengantar alami. Penelitian kualitatif dalam proses pencarian, pengumpulan dan analisis masalah, memakai teknik studi kepustakaan, serta melalui cara pengumpulan dan analisa dengan referensi berbagai tulisan akademis berupa dokumen, artikel ilmiah, melalui data tertulis atau internet terkait fakta empiris, teori, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Metode analisis data menggunakan deskriptif-analisis yang dilakukan secara komprehensif melalui adanya studi terhadap dokumen – dokumen serta adanya pengalaman penulis sebagai pengantar alami.

b. **Pendekatan**

Penulisan Taskap ini akan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan statuta (*statuta approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan statuta adalah penelaahan terhadap undang-undang atau peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang dikaji,⁸ sedangkan pendekatan konsep dimaksudkan untuk menemukan ide-ide dan konsep-konsep yang relevan terhadap isu yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.133.

sedang diteliti.⁹

6. Pengertian

a. Revitalisasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Revitalisasi merupakan proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Sehingga proses revitalisasi terhadap pembangunan masyarakat Papua dalam meningkatkan kesejahteraannya adalah proses yang menjadikan suatu langkah lanjutan dari proses pendekatan Pemerintah Pusat yang sudah dilaksanakan untuk menjadikan masyarakat Papua yang lebih maju dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

b. Sosial-Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "sosial" didefinisikan sebagai berkenaan dengan masyarakat atau yang berarti suatu sikap yang suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya). Sementara itu, "budaya" didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat-istiadat, kebiasaan yang sudah berkembang (beradab, maju), dan kebiasaan yang sukar diubah.¹⁰

Selain itu, budaya dapat didefinisikan sebagai struktur sosial yang terdiri dari berbagai aspek, seperti kebiasaan, pengetahuan, keyakinan, dan prinsip moral. Banyak orang menggunakan istilah "kebudayaan" juga untuk menyebut sosial-budaya secara umum. Sosial-budaya berasal dari pola pikir dan akal budi orang-orang yang hidup di dalam masyarakat. Setiap kebudayaan memiliki cara bertindak dan berpikir yang berkaitan dengan pengalaman dasar, jadi tidak dapat dilepaskan dari individu dan masyarakat. Pada akhirnya, kebudayaan berasal dari masyarakat manusia.¹¹

Perubahan kebudayaan berhubungan dengan perubahan sosial; misalnya, kebudayaan sebagai otak dan sosial sebagai tangan, di mana tangan melakukan apa yang dipikirkan otak. Jika pikiran berbeda dari

⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.

¹⁰ "Sosial," kbbi.web.id, Diakses pada 24 Maret 2024.

¹¹ Prasetyo, Joko Tri, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: IKAPI, 2004), hlm. 34-35.

kebiasaan, tindakan pun akan berbeda. Oleh karena itu, jika pikiran berubah, tindakan pun akan berubah. Kaitannya dengan perubahan ini, jika hendak memperbaiki atau merubah suatu masyarakat dengan pendekatan budaya, maka proses itu akan terjadi dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Harus ada adaptasi-adaptasi atau bahkan perombakan terhadap sistem sosial dan tatanan budaya masyarakat yang telah berlangsung, atau memaksimalkan potensi sistem sosial dan tatanan kebudayaan masyarakat yang telah ada, yang dengan itu masyarakat tersebut akan terberdaya dan dengan sendirinya akan menjadi sebab dari pembangunan masyarakat demi meningkatnya kualitas hidup.

c. Masyarakat Papua

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "masyarakat" didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹² Sehingga Masyarakat Papua yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah masyarakat asli Papua yang mendiami seluruh wilayah administratif Papua, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan empat Provinsi baru, yang mencakup 7 (tujuh) wilayah adat Saireri, Doberai, Ha-Anim, Tabi, Lano-Pagi dan Me-Pago.

d. Pembangunan Masyarakat

Pembangunan Masyarakat atau *Community Development* bermaksud untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat, kegiatan pembangunan masyarakat, juga dikenal sebagai pembangunan masyarakat, dilakukan secara sistematis, terprogram, dan bertujuan untuk meningkatkan jaringan komunitas lokal.¹³ Pembangunan masyarakat dilakukan dengan mengupayakan pemberian otonomi, wewenang, kepercayaan dan daya kepada masyarakat agar dapat kreatif, inovatif dalam memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi mereka dengan baik. Dengan demikian Pembangunan Masyarakat menekankan pada aspek kemandirian yang dilandasi oleh kebebasan untuk bertindak dan

¹² "Masyarakat," kbbi.web.id/masyarakat, Diakses pada 24 Maret 2024

¹³ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2009), hlm. 108.

bertanggungjawab.

Pembangunan Masyarakat dilakukan dengan menggali potensi asli masyarakat, kemudian dikembangkan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proses hulu hingga ke hilir dalam Pembangunan Masyarakat murni dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek dalam proses-proses Pembangunan. Dengan demikian, Pembangunan Masyarakat merepresentasikan beberapa nilai fundamental, yaitu *people centred*, *participatory*, *empowering* dan *sustainable*.

e. Kesejahteraan

Kesejahteraan diartikan secara beragam, misalnya Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup dengan mempertimbangkan "adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik". Namun, menurut BAPPENAS, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi BAPPENAS ini sama dengan definisi kesejahteraan dalam UUD 1945. Namun, UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi di mana kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

f. Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 adalah visi besar Indonesia di tahun 2045, yang merupakan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2025-2045. Di mana pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan menjadi negara maju, modern dan menjadi salah satu negara adi daya di dunia. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia membuat empat pilar utama atau visi utama menuju target 2045 tersebut, yaitu sumber daya manusia unggul,

demokrasi yang matang, pemerintah yang baik dan keadilan sosial.



BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Dalam bab ini akan menjabarkan dasar-dasar yang digunakan dalam menganalisis pertanyaan-pertanyaan kajian. Dasar-dasar tersebut terdiri dari peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pendekatan Sosial Budaya dalam penyelesaian masalah Papua mulai dari UUD NRI 1945 hingga Peraturan Presiden. Data/fakta disajikan untuk menggambarkan kondisi masyarakat Papua dengan permasalahan yang terus menerus menahun dan perkembangan stabilitas keamanan yang terus mengancam sehingga dapat menjadi luka yang tidak pernah sembuh dan selalu terkuak. Selanjutnya, kerangka teoretis dijabarkan untuk menganalisis data/fakta yang ada. Terakhir, perkembangan lingkungan strategis di level global, regional dan nasional yang berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat Papua yang dikaji dalam Taskap ini, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan sosial budaya yang perlu divitalkan kembali.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" adalah frasa kelima dari Pembukaan UUD 1945, yang berarti bahwa setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam hal apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh negara, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemerdekaan, dan lain-lain. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dengan demikian, dua amanat konstitusi di atas menjadi pedoman untuk penyelenggaraan negara dan pengelolaan kekayaan alam negara, yang semuanya dilakukan atas nama dan untuk kemakmuran rakyat.

Penyelesaian Papua saat ini yang lebih condong menguatamakan pendekatan bidang Pertahanan Keamanan melalui Operasi militer dengan

mengerahkan kekuatan TNI/Polri justru menimbulkan banyak persoalan bagi masyarakat dengan adanya korban yang timbul secara terus menerus. Pendekatan Sosial Budaya yang sudah dilakukan saat ini secara terus menerus belum optimal dan selalu menjadi program Pemerintah sejak dulu sehingga berdasarkan UUD NRI 1945 ini perlu untuk diungkit kembali.

b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam Undang-Undang ini, dijelaskan bahwa pembangunan nasional akan dilakukan berdasarkan demokrasi, prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Sistem perencanaan pembangunan nasional memastikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara fungsi pemerintah, antara pusat dan daerah, antara ruang dan waktu.

Pembangunan bagi masyarakat Papua yang dilaksanakan secara terus menerus selalu menjadi kendala karena cukup tingginya gangguan stabilitas keamanan serta belum tercapainya pendekatan secara sosial budaya dengan adanya tingkat sumber daya manusia yang cukup memperhatikan sehingga prinsip-prinsip dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini perlu diterapkan secara konsekuen bagi masyarakat Papua.

c. UU terkait Otsus dan Pembangunan Papua

Pemerintah mengeluarkan UU No. 2 tahun 2021, yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 21 tahun 2001. Selain memberikan dukungan untuk pembangunan masyarakat adat, UU tersebut menetapkan peraturan khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian. Dalam UU ini Pasal 38 telah ditegaskan bahwa dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib mengutamakan OAP.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan UU untuk membentuk enam Provinsi baru di Papua, yaitu UU No. 14, 15, 16 dan 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya. Tujuan pemekaran ini adalah

untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat martabat Orang Asli Papua.

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dirancang melalui Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022–2041, yang ditetapkan dalam Perpres No. 24 tahun 2023. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif.

d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar semua warga negara melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan pendekatan sosial-budaya, harus pula memperhatikan hal-hal di atas, di antaranya adalah keterberdayaan dan kemandirian masyarakat Papua, serta keberlanjutan. Usaha-usaha yang dimaksudkan untuk tercapainya kondisi-kondisi tersebut, perlu diupayakan dengan cara-cara yang terukur, sistematis, bottom up dan efektif serta efisien.

e. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menegaskan bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dapat dilakukan oleh kekuatan TNI, namun kewenangan menjalankan OMSP merupakan kebijakan yang berada pada Presiden dengan persetujuan DPR, atau merupakan keputusan politik negara. Dalam melaksanakan UU ini TNI mengimplementasikan kegiatannya dengan membantu jalannya roda pemerintahan khususnya dibidang Kesehatan dengan adanya Bansos medis dan tenaga medis di daerah Papua, Pendidikan dengan adanya prajurit TNI yang ikut mengajar di sekolah sekolah serta adanya pembinaan psikologis

dalam kegiatan Komunikasi Sosial yang selalu dilakukan oleh prajurit dalam kehidupan sehari – hari. Secara tidak langsung TNI sudah sangat membantu dalam Pembangunan SDM Masyarakat Papua.

f. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13 menjelaskan bahwa Tugas Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kaitannya dengan masalah Papua, sudah seharusnya penegakan hukum lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman, pelayanan dan merangkul masyarakat. hal ini didorong dengan aparat kepolisian sudah dibekali pemahaman tentang kondisi sosiologis, antropologis, kebudayaan dan kondisi psikologis masyarakat Papua. Merevitalisasi pendekatan sosial-budaya dalam membangun masyarakat Papua memerlukan peran serta aparat Kepolisian dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat dari gangguan kriminalitas.

9. Data dan Fakta

a. Dilema Pendekatan Pertahanan dan Keamanan

Merespon masalah Papua, pemerintah melakukan penanganan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, namun hingga saat ini, ancaman kekerasan dan bentrok senjata antara TNI-POLRI dengan KKB-KSB ataupun TPNPB-OPM tidak kunjung usai. Berdasarkan laporan ACLED, bentrokan senjata antara TNI-POLRI dengan dengan KKB-KSB ataupun TPNPB-OPM meningkat sejak 2018 kemudian meningkat lebih besar lagi pada 2021.¹⁴ Pada 2023 tercatat ada 200 kali gangguan keamanan yang masih dilakukan oleh KKB dengan korban jiwa sebanyak 64 orang, korban luka sebanyak 81 orang dan sandera 1 orang.¹⁵

¹⁴ “Papuan Independence and Political Disorder in Indonesia,” acleddata.com/2022/10/05/papuan-independence-and-political-disorder-in-indonesia/, 24 Maret 2024.

¹⁵ “Penanganan Gangguan KKB,” img.antaraneews.com/cache/infografis/-penanganan-gangguan-kkb. 24 Maret 2024

Terbaru, pada Maret 2024, 2 orang anggota Polri dan 1 warga sipil tewas ditembak KKB di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Menyikapi peristiwa ini, Polda Papua kemudian mengerahkan 1 pleton Brimob untuk mengejar pelaku penembakan tersebut. Kemudian beredar luas di media sosial, seorang warga asli Papua yang dinarasikan sebagai anggota KKB ditangkap dan disiksa secara kejam di dalam drum oleh beberapa orang oknum anggota TNI.

Di satu sisi pelanggaran HAM selalu muncul di Papua dan masih menjadi perhatian serius, sebab setelah berpuluh-puluh tahun sejak Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia, tingkat pelanggaran HAM di Papua tidak kunjung membaik sampai sekarang. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan bahwa pada tahun 2023 saja, telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM sebanyak 113 kasus, dan 80 kasus di antaranya berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata.¹⁶

Peristiwa seperti ini terus terjadi, berulang dan konflik terus berlanjut. Pengerahan pasukan TNI dan Polri di Papua secara besar-besaran, sejak bertahun-tahun lalu, nyatanya tidak menyurutkan perlawanan dari kelompok-kelompok pemberontak. Korban berjatuhan bukan hanya dari kelompok pemberontak, melainkan juga dari TNI-POLRI dan lebih-lebih dari korban masyarakat sipil. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri, bahwa apakah pendekatan pertahanan dan keamanan relevan sebagai alternatif tunggal dalam menyelesaikan masalah Papua, yang sedari awal akar permasalahannya adalah soal kebijakan politik pemerintah Indonesia yang berlanjut pada keadilan sosial yang timpang di wilayah Papua.

b. Papua Dalam Data BPS.

Membangun Papua ke arah yang lebih baik, dibutuhkan terpenuhinya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator kesejahteraan adalah tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu masyarakat berubah dari tingkat kesejahteraan yang rendah kepada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Untuk mengukur kualitas hidup masyarakat, Badan Pusat Statistik (BPS) memeriksa 8 aspek yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi,

¹⁶ "Komnas HAM: Situasi HAM di Papua Belum Membaik," <https://news.detik.com/berita/d-7160299/komnas-ham-situasi-di-papua-belum-membaik>, 30 Maret 2024.

pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan aspek sosial lainnya.

Dalam mengkaji pembangunan Papua dengan pendekatan sosial - budaya dalam tulisan Taskap ini berfokus pada perbaikan di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan (SDM) dan ekonomi serta dampak psikologis dari tindak kejahatan yang terjadi.

1) Kondisi Kependudukan

Salah satu modal utama dalam pembangunan adalah penduduk, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas penduduk yang menjadi objek pembangunan. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan di Papua. Jumlah dan kualitas orang atau masyarakat Papua akan sangat menentukan program-program pembangunan yang dilakukan di tanah Papua.

Kaitannya dengan aspek atau indikator penduduk ini, merujuk “*Analisis Tematik Kependudukan Provinsi Papua*” yang diterbitkan BPS Provinsi Papua tahun 2023¹⁷, dan “*Analisis Tematik Kependudukan Provinsi Papua Barat*” yang diterbitkan BPS Provinsi Papua Barat tahun 2023, menunjukkan data sebagai berikut:

a) Tingkat Fertilitas

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 menunjukkan angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun (di bawah 20 tahun) di Provinsi Papua mengalami peningkatan jika dibandingkan Sensus Penduduk tahun 2010, yakni dari 56 angka kelahiran menjadi 59 angka kelahiran per 1000 perempuan. Atau secara umum, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, *Total Fertility Rate* (TFR) di Papua mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni hanya berada pada angka 2,76, yang berarti hanya ada 2-3 anak yang dilahirkan selama masa reproduksi perempuan secara umum di Provinsi Papua. Sementara itu, CBR di Provinsi Papua berada pada angka 22,03 kelahiran per 1000 penduduk. Angka mortalitas atau kematian bayi di Provinsi

¹⁷ Data yang disajikan adalah gambaran seluruh wilayah Provinsi Papua sebelum pemekaran

Papua sendiri mencapai 38,17 kematian.

Sedangkan di Provinsi Papua Barat, angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun (di bawah 20 tahun) berada pada angka 37,50 kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun. Sedangkan TFR secara umum di Provinsi Papua Barat berada pada angka 2,66 atau rata-rata anak yang dilahirkan hidup oleh perempuan selama usia subur adalah 2-3 anak. Sementara CBR di Provinsi Papua Barat mencapai angka 22,84 kelahiran dari 1000 penduduk, atau sekitar 22-23 kelahiran. Angka mortalitas atau kematian bayinya sendiri mencapai angka 37,6 kematian.

Secara keseluruhan, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah keseluruhan penduduk Provinsi Papua sebesar 4.303.707 jiwa, sedangkan Provinsi Papua Barat sebesar 1.134.068. dan dapat pula disimpulkan, angka kematian bayi di dua provinsi ini jauh lebih tinggi daripada total angka kelahiran yang ada.

b) Arus Migrasi

Hingga saat ini belum ada data yang secara pasti menunjukkan berapa jumlah nyata OAP di wilayah Papua, di mana keseluruhan penduduknya mencapai lima jutaan penduduk. Namun hal menarik disampaikan dalam hasil penelitian Dr. Jim Elmslie dari Universitas Sidney pada akhir 2007, Jim memprediksikan bahwa hingga 2030 pertumbuhan penduduk Papua akan didominasi penduduk non-Papua (pendatang). Bahkan lebih mengejutkan lagi, dalam penelitian yang dirilis *Indonesian Solidarity and the West Paper Project*, pada 9-10 Agustus di Sidney-Australia, menyebutkan bahwa mulai 2030 hingga 2050, Orang Asli Papua (OAP) atau ras Melanesia akan musnah dari tanah kelahirannya. Jim menjelaskan bahwa ada peningkatan populasi yang timpang pada tiap tahunnya antara OAP dan non-OAP, di mana jumlah non-OAP meningkat sangat tajam akibat migrasi ke dalam Papua, sementara OAP justru mengalami perlambatan peningkatan

populasi. Hal ini menyebabkan OAP justeru menjadi minoritas di tanah kelahirannya sendiri.

Berdasarkan *Long Form* Sensus Penduduk tahun 2020, tercatat ada sekitar 10,96% penduduk di Provinsi Papua yang tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggalnya saat ini. Itu berarti hampir 11 dari 100 penduduk Papua lahir di provinsi lain (migrasi seumur hidup). Angka ini memang relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2010, di mana angka migrasi seumur hidup mencapai 15,38%.

Provinsi Papua yang saat ini telah dimekarkan menjadi beberapa Provinsi (Daerah Otonomi Baru). Berdasarkan data BPS, arus migrasi seumur hidup pada tahun 2022 di Provinsi Papua dan tiga Provinsi baru lainnya, masih terpusat di Provinsi Papua, kemudian diikuti Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dan apabila dirinci per kabupaten/kota, maka arus migrasi seumur hidup masih terpusat di Kota Jayapura dan diikuti Kabupaten Jayapura, serta Merauke. Apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia, arus migrasi di Provinsi Papua terbilang cukup rendah, namun jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia Timur lainnya, seperti Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat, maka arus migrasi di Provinsi Papua masih menjadi yang tertinggi.

Sedangkan di Papua Barat yang dimekarkan menjadi 2 provinsi, berdasarkan Sensus Penduduk 2020, ada 242.683 jiwa yang bermigrasi ke dalam Provinsi Papua Barat, hal ini menunjukkan angka yang sangat signifikan, sebab mencapai 20,5 persen dari total seluruh penduduk di Provinsi Papua Barat. Migrasi masuk seumur hidup tertinggi adalah di Kota Sorong dengan jumlah 127.257 migran. Migrasi risen tertinggi juga berada di Kota Sorong dengan jumlah 15.296 migran.

Dari uraian di atas, maka disimpulkan bahwa tingginya arus migrasi di Provinsi Papua dan Papua Barat tentu sangat memperengaruhi pola interaksi dan sosial-budaya yang berkembang

di Papua. Termasuk dalam hal ini adalah persaingan dalam kehidupan sosial menjadi hal yang tidak dapat terelakan. Migran yang masuk ke Papua biasanya telah memiliki tekad dan kecakapan dalam mengembangkan pendapatan atau hidupnya lewat perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. Sedangkan OAP yang notabene adalah warga asli setempat, dengan tingkat SDM yang rendah akan sangat sulit bersaing dengan para pendatang.

2) Kondisi Pendidikan (SDM)

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 yang dihitung berdasarkan empat indikator, yakni Umur Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pendapatan per Kapita per Tahun yang Disesuaikan, menunjukkan Provinsi Papua berada pada peringkat terendah dari seluruh provinsi Indonesia dengan skor hanya 61,39, kemudian disusul Provinsi Papua Barat sebagai provinsi dengan IPM terendah kedua se Indonesia dengan skor 65,89.¹⁸ Peringkat tahun 2022 ini tidak banyak berubah jika dilihat dalam peringkat tahun 2023, di mana Papua dan Papua Barat masih setia bertengger pada urutan terendah IPM seluruh Indonesia, di mana Papua mendapatkan skor 62,25 dan Papua Barat 66,66.¹⁹

Sementara kondisi angkatan muda di Papua, menunjukkan bahwa ada sekitar 8,33 persen pemuda di Provinsi Papua tidak dapat membaca dan menulis, kemudian menyusul empat provinsi lainnya dengan tingkat Angka Melek Huruf (AMH) pemuda di bawah angka nasional yaitu provinsi Kalimantan Utara (99,73 persen), Sulawesi Barat (99,64 persen), Nusa Tenggara Timur (99,28 persen) dan Papua Barat (99,37 persen).²⁰ Sehingga dapat disimpulkan kondisi pemuda di wilayah

¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2022*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 21

¹⁹ Bapennas, *Capaian Indikator Utama Pembangunan*, <https://simreg.bapennas.go.id/home/pemantauan/ipm>, 24 Februari 2024

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemuda Indonesia 2023, Vol.21, 2023*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 52

Papua berada pada tingkat buta huruf yang sangat besar jika dibandingkan daerah lainnya.

Berdasarkan publikasi BPS, pada tahun 2022 tercatat 3,65% penduduk usia dewasa atau berusia 15 tahun ke atas yang mengalami buta huruf. Provinsi Papua menyumbang angka buta huruf orang dewasa terbanyak di Indonesia, dengan persentase mencapai 18,81%.

Sedangkan Provinsi Papua Barat berada pada angka 2,36%, lebih rendah dari Lampung (2,75%), Sulawesi Tenggara (4,21%), Bali (4,47%), DI Yogyakarta (4,85%), Nusa Tenggara Timur (5,37%), Jawa Tengah (5,74%), Kalimantan Barat (6,04%), Sulawesi Barat (6,18%), Jawa Timur (6,68%), Sulawesi Selatan (6,69%) dan Nusa Tenggara Barat (11,03%).²¹ Sehingga bisa disimpulkan, bahwa wilayah Papua yang mencakup Papua dan Papua Barat (sudah termasuk daerah otonomi baru) masih menanggung beban tingkat buta huruf yang cukup besar.

Sehingga berdasarkan dua data BPS di atas, dapat disimpulkan kondisi angkatan muda atau orang dewasa yang berusia di atas 15 tahun di wilayah Papua berada pada tingkat buta huruf yang sangat besar jika dibandingkan daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Kondisi demikian haruslah dipandang sebagai masalah yang tidak sederhana, para pemangku kebijakan harus mengupayakan langkah-langkah strategis dan jalan keluar yang sehat bagi keadaan yang timpang tersebut. Bisa dengan memulai membangun masyarakat Papua menggunakan pendekatan sosial-budaya, kemudian mengoptimalkan terpenuhinya indikator-indikator kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

3) Kondisi Kesehatan Dan Gizi

Kesehatan merupakan salah satu faktor dalam kualitas pembangunan manusia suatu daerah atau negara. Indikator kesehatan dan gizi seperti derajat kesehatan penduduk, imunitas dan pemenuhan

²¹ Sarnita Sadya, *Provinsi dengan Tingkat Buta Huruf Tertinggi-Terendah per 2022*, <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/provinsi-dengan-tingkat-buta-huruf-tertinggi-terendah-per-2022>, 24 Februari 2024

gizi balita, hingga ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, secara langsung dianggap memberikan gambaran mengenai kualitas hidup penduduk di suatu daerah. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan suatu masyarakat atau penduduk, di antaranya yaitu angka kematian, angka kesakitan, dan angka harapan hidup. Apabila angka kematian dan kesakitan rendah, itu menandakan tingginya derajat kesehatan penduduk. Sebaliknya apabila derajat kesehatan penduduk tinggi, maka menandakan tingginya angka harapan hidup masyarakat.

Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kerja di Papua cenderung meningkat atau meningkat setiap tahunnya. Misalnya, membandingkan angka tahun 2002 dengan 2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan di Papua. Saat kebijakan Otonomi Khusus dimulai pada tahun 2002, jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas bahkan meningkat hampir tiga kali lipat. sementara jumlah tenaga medis, termasuk paramedis dan dokter, telah meningkat lebih dari dua kali lipat.

Masalah kesehatan di Papua masih mengkhawatirkan, meskipun ada peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Misalnya, gejala kesehatan seperti kesehatan ibu hamil, gizi buruk, malaria, campak, TBC, dan HIV menyebabkan hampir semua orang di masyarakat dari berbagai usia terkena penyakit tersebut. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa tingkat kesehatan Ibu dan bayi OAP lebih rendah daripada non OAP. LSM Internasional, *Medecins du Monde* menemukan bahwa tingkat kematian bayi OAP sangat tinggi yaitu mencapai 85-150 per 1000 kelahiran dan tingkat kematian ibu OAP tiga kali lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia, yaitu mencapai 500-1000 kematian per 100.000 persalinan. Bahkan penyakit mematikan seperti HIV dan AIDS menjangkiti OAP 3,6 kali lebih tinggi dari non OAP.²²

Sementara itu, berkaitan dengan angka kematian ibu di wilayah Papua dan Papua barat, masing-masing berada pada rata-rata 45,69% dan 48,91%, di mana angka ini berada sangat jauh dari rata-rata nasional

²² Agus Irianto Sumule, dkk, *Kajian Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat,* (Jakarta: KOMPAK, 2022), hlm. 2.

yaitu 86,28%. Faktor ini dikatakan sebagai penyebab tingginya angka kematian ibu di wilayah Papua. Pun terkait angka kematian bayi, indeks kesehatan balita di Papua adalah terendah di Indonesia, bahkan lebih rendah dibanding tahun 2013.²³

Pada Desember 2017 sampai Februari 2018 terjadi kejadian luar biasa di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Asmat. Di mana saat ini terdapat 66 orang meninggal dunia akibat campak dan 10 orang lainnya meninggal karena gizi buruk. Hal ini cukup mengkhawatirkan, sebab -sebagaimana di jelaskan di atas, bahwa rendahnya derajat kesehatan suatu masyarakat, sangat mempengaruhi tinggi-rendahnya angka harapan hidup masyarakat tersebut. Wilayah Papua menjadi salah satu wilayah yang selalu berhadapan dengan persoalan kesehatan yang tidak berkesudahan. Misalnya terkait gizi buruk tadi, berdasarkan laporan tahun 2022, di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Mimika, terdapat 60 kasus gizi buruk (0,7%), meski angka ini menurun dari angka tahun sebelumnya yaitu 1,6%, tetap saja selama masih ada kasus gizi buruk, apalagi ditambah dengan masalah kesehatan lainnya, maka pembangunan masyarakat di wilayah Papua masih menemukan kendala serius.

4) Kondisi Kemiskinan

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), mengacu pada Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2023, tercatat Provinsi Papua dan Papua Barat (sudah mencakup wilayah otonomi baru) berada pada tingkat kemiskinan ekstrim tertinggi secara nasional yang berada pada angka 5%, dengan Provinsi Papua dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi sebesar 7,67% dan Papua Barat pada angka 6,43%.

Apabila ditarik lebih jauh, persoalan kemiskinan ini disebabkan oleh banyak faktor dan menyebabkan banyak hal terhadap pembangunan wilayah Papua. Sebagaimana dijelaskan di atas, kondisi kependudukan, kualitas SDM dan kondisi kesehatan serta gizi masyarakat Papua sangat

²³ *Ibid.* hlm. 10

besar sumbangsuhnya pagi tingkat kemiskinan di Papua. Kemiskinan di wilayah Papua itu pun menjadi sebab permasalahan pada kependudukan, SDM dan kualitas kesehatan masyarakatnya. Sehingga kemiskinan ini bisa dilihat sebagai akibat bisa pula sebagai sebab.

Pembangunan ekonomi menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan di Papua, dan harus dimulai dengan memberdayakan masyarakat Papua, khususnya OAP. Meningkatnya ekonomi akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Papua. Pemerintah memang harus betul-betul membaca Papua secara cermat, agar dapat mengidentifikasi apa masalah utama Papua dan harus diselesaikan mulai dari mana.

5) Kondisi Sosial Lainnya

Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2023, yang dimaksud Kondisi Sosial Lainnya dalam indikator kesejahteraan rakyat adalah salah satu indikator yang memberikan penjelasan tentang perubahan taraf kesejahteraan rakyat pada bidang sosial yang belum terangkum pada penjelasan sebelumnya, yakni Kondisi Kependudukan, Kondisi SDM, Kondisi Kesehatan dan Gizi, dan Kondisi Kemiskian. Salah satu Indikator yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial lainnya adalah dengan melihat presentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan. Kejahatan yang dimaksud mencakup pencurian, penganiayaan, tindak kekerasan, pelecehan seksual dan kejahatan lainnya.

Kaitannya dengan wilayah Papua, cukup beralasan untuk menggunakan indikator kejahatan dalam melihat tingkat kesejahteraan di wilayah Papua. Mengingat persoalan pertahanan dan keamanan di wilayah Papua merupakan masalah krusial yang menjadi perhatian sejak dahulu, sebab berpotensi pada ancaman disintegrasi wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Nerdasarkan laporan Statistik Kriminal tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, tercatat Provinsi Papua Barat berada pada urutan pertama sebagai wilayah dengan resiko terkena kejahatan, menyusul pada urutan ke enam adalah Provinsi Papua. Hal ini menggambarkan

bahwa baik Provinsi Papua Barat maupun Provinsi Papua berada pada tingkat resiko terkena kejahatan tertinggi di Indonesia.

c. Budaya.

Dalam penelitian antropologi yang merujuk atau mengadopsi sistem pembagian wilayah Papua zaman Penjajahan Belanda, seluruh wilayah Papua dibagi atau digolongkan menjadi 7 (tujuh) wilayah adat, yaitu:

- a) Wilayah adat Mamta/Tabi, terdiri dari 87 suku yang mendiami Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Memberamo Raya dan Kabupaten Keerom. Salah satu ciri wilayah adat Mamta yang membedakannya dengan wilayah adat lainnya adalah pada sistem kepemimpinannya yang menganut sistem kepemimpinan Klan (Ondoafi), dimana rotasi kepemimpinan dilakukan dengan pewarisan kepada keturunan pemimpin Klan atau Ondoafi;
- b) Wilayah Adat Saerir, terdiri dari 31 suku yang menyebar di sekitar Teluk Cenderawasih, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, dan sebagian Nabire bagian pantai (pesisir);
- c) Wilayah Adat Bomberai, terdiri dari 19 suku yang tersebar di wilayah administrasi Provinsi Papua Barat (sebelum pemekaran atau daerah otonomi baru), yang meliputi Fak-Fak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Mimika (wilayah pantai);
- d) Wilayah Adat Domberai, terdiri dari 52 suku yang tersebar di wilayah administratif Provinsi Papua Barat (sebelum pemekaran atau daerah otonomi baru), yang meliputi sekitar Sorong, Monokwari, Bintuni, Wondama, Raja Ampat, Kota dan Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan dan Tambrauw;
- e) Wilayah Adat Anim Ha, terdiri dari 29 suku yang tersebar di Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi. Suku Marind Anim adalah yang terbesar di wilayah adat ini, dengan tujuh Klan atau Marga besarnya, yaitu Gebze, Kaize, Samkakai, Ndiken, Mahuze, Balagaize dan Basik-basik;
- f) Wilayah Adat La Pago, terdiri dari 19 suku yang tersebar di

Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Wamena, Lani Jaya, Puncak Jaya, Puncak Enam, Nduga, Yakuimo, Yalimo, Mamberamo Tengah dan Tolikara;

g) Wilayah Adat Mee Pago, terdiri dari 11 suku yang tersebar di Pegunungan Papua bagian tengah, yaitu Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire bagian gunung dan sebagian Mimika bagian gunung.

Pembagian wilayah papua ke dalam 7 wilayah adat tersebut, dilakukan dengan memperhatikan indikator-indikator tertentu yang merujuk pada kesamaan dalam beberapa aspek, yaitu hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, sistem kepemimpinan, ciri-ciri fisik, letak geografis dan lain sebagainya. Namun sebagian kalangan menganggap bahwa pembagian tersebut tidak menggambarkan kesamaan ciri khas budaya yang dimiliki suku-suku bangsa di Papua. Pembagian wilayah Papua pada masa penjajahan Belanda dianggap hanya berfokus pada batasan wilayah geografis untuk memudahkan jangkauan pembangunan semata, sehingga dalam pembagiannya terdapat pencampuran lebih dari satu suku bangsa dalam satu wilayah pembagian yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda.

d. **Sumber Daya Alam.**

Papua tercatat memiliki potensi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat besar, yang terdiri dari berbagai sektor, seperti: *pertama*, sektor pertambangan meliputi minyak, gas, emas, perak, nikel, tembaga dan gas alam; *kedua*, sektor tanaman pangan antara lain padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan; *ketiga*, sektor tanaman perkebunan antara lain kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, karet dan tebu; *keempat*, sektor peternakan seperti babi, sapi potong dan kambing; *kelima*, sektor perikanan dan kelautan seperti perikanan tangkapan laut, budidaya perikanan laut, tambak, kolam, karamba dan jaring apung; *keenam*, sektor industri hilir seperti industri buah merah, kakao dan kelapa; *ketujuh*, sektor industri pengolahan turunan hasil pertanian, perikanan dan pertambangan serta minyak dan gas; *kedelapan*, sektor pariwisata terutama wisata alam seperti pegunungan, danau dan taman nasional; *kesembilan*, wisata bahari seperti Raja Ampat dan wisata budaya

seperti Festival Budaya Lemba Baliem.²⁴

Kekayaan pada sektor tambang misalnya, dari luas 1.181.071,52 hektar wilayah tambang emas yang dimiliki Indonesia dan tersebar di 25 provinsi, Papua adalah daerah yang memiliki luas wilayah tambang terluas se-Indonesia, dengan luas wilayah tambang 229.893,75 hektar, dengan cadangan bijih emas sebesar 52% dari seluruh cadangan bijih emas yang tersebar di seluruh Indonesia. Tambang emas di Papua tersebar di beberapa kabupaten, yakni Penugungan Bintang, Keerom, Nabire, Dogiyani, Mimika dan Paniai. Selain emas, Papua juga memiliki setidaknya 176 juta ton bijih dan 1875 juta ton bijih untuk cadangan perak. Pada 2021, Tambang Grasberg yang berada di Papua, telah memproduksi 1,34 miliar pon tembaga, angka ini menempatkan Papua sebagai wilayah tambang Grasberg terbesar kedua yang berhasil memproduksi tembaga setelah Freeport-McMoRan di Amerika Utara yang berhasil memproduksi 1,46 miliar pon tembaga.²⁵

Namun semua kekayaan yang dimiliki Papua tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, seolah-olah kekayaan yang ada hanya fatamorgana, sementara masalah demi masalah dari berbagai aspek terus menjadi momok dan anomali bagi masyarakat Papua sebagai pemilik sah atas warisan kekayaan alam dan budaya yang dikandung tanah air mereka sendiri. Berbagai data statistik dan sumber-sumber lainnya menunjukkan adanya fakta yang bertolak belakang antara wilayah Papua yang begitu kaya dengan kondisi masyarakat yang menghuninya.

e. Otonomi Khusus.

Otonomi khusus Papua didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintahan sentralistik belum memenuhi rasa keadilan, memungkinkan kesejahteraan rakyat, mendukung penegakan hukum, dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh Papua, terutama masyarakat Papua. Kondisi ini menimbulkan perbedaan di hampir semua bidang kehidupan, terutama di

²⁴ Yasinta Arum Rismawati, "Potensi Sumber Daya Alam Papua dan Pembagian Wilayahnya," <https://tirto.id/potensi-sumber-daya-alam-papua-dan-pembagian-wilayahnya-gTcs>, 23 Februari 2024.

²⁵ Aulia Mutiara Hatia Putri, "Dilirik Asing, Ini Tiga Harta Karun Papua yang Haruas Dijaga," <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230112135042-128-404986/dilirik-asing-ini-tiga-harta-karun-papua-yang-harus-dijaga>, 23 Februari 2024

bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial politik. Upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dianggap tidak mencapai akar masalah dan keinginan masyarakat Papua, yang menyebabkan banyak kekecewaan dan ketidakpuasan.

Namun setelah otonomi khusus, kondisi Papua belum mengalami perubahan yang berarti, banyak penelitian bahkan menyimpulkan otonomi khusus tersebut gagal atau tidak lebih dari sekedar indah di atas kertas namun buruk dalam realisasi. Berdasarkan laporan BPK, pada kurun waktu 2002 sampai 2010, ada penyelewengan dana otonomi khusus sebesar Rp.4,2 Triliun dari total dana otonomi khusus Rp. 28,8 Triliun. Bahkan sejak 2002 sampai 2021, dana yang telah digelontorkan pemerintah kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang merupakan total keseluruhan dukungan fiskal sebesar Rp.1.092 triliun. Jumlah ini terdiri dari dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) mencapai Rp.138,65 triliun, dana transfer ke daerah dana desa (TKDD) sebesar Rp. 702,20 triliun serta belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp.251,29 triliun. Namun dana sebesar itu tidak dapat dikonversikan kepada peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan.

10. Kerangka Teoritis

a. Teori Sosial-Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "sosial" didefinisikan sebagai berkenaan dengan masyarakat atau yang berarti suatu sikap yang suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya). Sementara itu, kata "budaya" didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat-istiadat, kebiasaan yang sudah berkembang (beradab, maju), dan kebiasaan yang sulit diubah.²⁶ Selain itu, budaya dapat didefinisikan sebagai struktur sosial yang terdiri dari berbagai aspek, seperti kebiasaan, pengetahuan, keyakinan, dan prinsip moral. Secara umum, kata "kebudayaan" juga digunakan untuk menggambarkan sosial-budaya secara keseluruhan. Sosial-budaya berasal dari cara manusia hidup dalam masyarakat. Setiap kebudayaan memiliki cara bertindak dan berpikir yang

²⁶ "Sosial," kbbi.web.id, Diakses pada 24 Maret 2024.

berkaitan dengan pengalaman dasar, jadi tidak dapat dilepaskan dari individu dan masyarakat. Akhirnya di mana manusia hidup bermasyarakat di sanalah ada kebudayaan.²⁷

Harus ada adaptasi-adaptasi atau bahkan perombakan terhadap sistem sosial dan tatanan budaya masyarakat yang telah berlangsung, atau memaksimalkan potensi sistem sosial dan tatanan kebudayaan masyarakat yang telah ada, sehingga masyarakat tersebut akan terberdaya dan dengan sendirinya akan menjadi sebab dari pembangunan masyarakat demi meningkatnya kualitas hidup.

b. Teori Kesejahteraan

Grand theory Kesejahteraan yaitu Welfare State menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah utility (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan²⁸.

Dalam kondisi saat ini kesejahteraan masyarakat Papua jauh tertinggal dari daerah daerah lain sehingga menjadi suatu prioritas bagi pemerintah untuk meningkatkannya dalam menuju Indonesia Emas 2024.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, BPS memberikan atau mengukurnya dengan 8 indikator, yakni: kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, dan sosial lainnya (seperti dampak kekerasan, kriminalitas dan lain-lain). Artinya apabila indikator-indikator tersebut rendah atau tidak mencapai minimal ambang batas, maka suatu masyarakat dianggap belum sejahtera, demikian sebaliknya apabila indikator-indikator tersebut menunjukkan angka yang tinggi atau minimal di atas ambang batas, maka suatu masyarakat digolongkan ke dalam masyarakat sejahtera.

c. Teori Pemberdayaan dan Pembangunan

Pemberdayaan, juga dikenal sebagai empowerment, berasal dari kata

²⁷ Prasetyo, Joko Tri, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: IKAPI, 2004), hlm. 34-35.

²⁸ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (2016), 103.

"power", yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Ini merujuk pada kemampuan seseorang atau suatu masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan lemah. Pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat memiliki kekuatan atau kemampuan untuk: *pertama*, memenuhi kebutuhan dasarnya untuk memiliki kebebasan (*freedom*), bukan saja kebebasan berpendapat dan berbuat, melainkan bebas atas kelaparan, kebodohan, gizi buruk, dan lain sebagainya; *kedua*, Masyarakat memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber daya produktif, yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang dan mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan; ketiga, mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka.²⁹

Sementara itu, Pembangunan Masyarakat (*Community Development*) dapat dijelaskan sebagai aktivitas peningkatan taraf hidup masyarakat yang dirancang, diprogramkan, dan dilakukan dengan tujuan meningkatkan jaringan komunitas lokal untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup.³⁰

Pembangunan Masyarakat dilakukan dengan menggali potensi asli masyarakat, kemudian dikembangkan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proses hulu hingga ke hilir dalam Pembangunan Masyarakat murni dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan juga subjek dalam proses-proses Pembangunan Masyarakat. Dengan demikian, Pembangunan Masyarakat merepresentasikan beberapa nilai fundamental, yaitu *people centred, participatory, empowering dan sustainable*.

d. Teori Pertahanan dan Keamanan

Keamanan atau *security* berasal dari bahasa latin *securus*, yang berarti terbebas dari bahaya, ketakutan dan ancaman.³¹ Keamanan dilihat dari dua

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), hlm. 57-58.

³⁰ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hlm. 108.

³¹ P.H. Liotta, "Boomerang Effect: The Convergence of Nation and Human Security," *Security Dialogue*, Vol. 4. 2002, hlm. 473.

pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan tradisional yang mengartikan keamanan sebagai keamanan suatu negara yang dapat diintervensi oleh militer dari negara lain dan harus dilindungi oleh negara tersebut dengan kekuatan militernya. Dalam pendekatan ini negara sebagai subjek dan objek dalam menciptakan keamanan. Sedangkan pendekatan non tradisional yang merupakan keamanan yang difokuskan pada kebutuhan keamanan dari para pelaku bukan negara.³²

11. Lingkungan Strategis

a. Global

Sebagai bagian dari komunitas global, isu-isu nasional Indonesia tidak dapat dilihat sebagai suatu hal yang eksklusif dan berdiri sendiri tanpa melihat pengaruh langsung dan tidak langsung dari isu yang berkembang secara global. Misalnya apa yang dilakukan oleh Vanuatu dengan mengangkat isu Papua Merdeka dalam forum-forum global, khususnya dalam pertemuan tahunan UNGA (*United Nation General Assembly*), dengan membentuk opini publik pada tingkat global bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat atas masyarakat Papua yang notabene adalah ras Melanesia dan mengekang hak-hak asasi mereka untuk merdeka dari kolonialisasi Republik Indonesia. Hal ini mengharuskan Indonesia untuk dapat memainkan diplomasi global dan melakukan tangkisan atas opini publik yang hendak dibangun khususnya oleh negara di pasifik selatan yang sangat berbahaya bagi keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Di samping itu, pergeseran kekuatan global dan konflik asimetris antar negara harus diperhatikan secara baik oleh pemerintah Indonesia. Sebab pergeseran kekuatan tersebut berdampak pada situasi global yang tidak menentu, cepat berubah dan sulit diprediksi. Hal ini mendorong setiap negara untuk siap sedia mempertahankan kepentingan nasionalnya. Bagi negara adidaya atau negara maju, cara mempertahankan kepentingan nasionalnya tidak terlalu sulit, mereka dapat memanfaatkan isu terorisme, HAM,

³² Al-A'raf, "Dinamika Keamanan Nasional," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 28-29.

demokratisasi dan isu lingkungan. Sementara negara-negara berkembang seperti Indonesia, hanya menjadi korban bagi penetrasi global yang dilakukan negara-negara maju di segala bidang kehidupan, hal seringkali menimbulkan benturan kepentingan global dan kepentingan nasional dalam negara-negara berkembang.

Berbagai isu global dan proyek-proyek ambisius negara-negara maju seringkali membuat repot negara berkembang, bahkan memicu konflik internal dalam negara berkembang tersebut. Misalnya proyek ambisius *Belt and Road Initiative* (BRI) Cina, yang oleh pemerintah Indonesia mau tidak mau diterima sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonominya, padahal di beberapa negara BRI dengan skema *debt trap diplomacy*-nya ampuh membuat negara berkembang kehilangan kedaulatannya. Namun tampaknya hal tersebut tidak membuat pemerintah Indonesia sanggup menolak proyek ambisius Cina via BRI nya, termasuk membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina di wilayah-wilayah pertambangan yang dikuasai Cina seperti di Morowali-Sulawesi Tengah. Sekalipun berbagai protes dan perlawanan dilakukan rakyat atas kebijakan pemerintah Indonesia memberikan karpet merah pada Cina, tetap saja hal tersebut tidak lantas merubah pendirian pemerintah.

Negara-negara maju juga kerap menggunakan PBB untuk menekan dan mengintervensi negara lain, bahkan negara-negara maju ini saling berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya di berbagai kawasan untuk mengimbangi kekuatan lawannya. Hal ini misalnya apa yang dilakukan AS di timur tengah, Asia, Afrika hingga Australia. Paling dekat misalnya intervensi yang dilakukan AS di wilayah pasifik untuk mengimbangi ekspansi dan klaim Cina atas laut cina selatan, termasuk apa yang dilakukan AS terhadap Taiwan untuk menghadapi ancaman Cina.

Persoalan-persoalan global ini perlu menjadi perhatian serius, sebab langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap kepentingan nasional yang dalam hal ini berkaitan dengan isu persoalan Papua.

b. Regional

Sejumlah isu keamanan masih mewarna stabilitas regional, khususnya asia tenggara. Misalnya konflik yang bersumber dari klaim teritorial, keamanan

jalur pelayaran dan perdagangan, isu terorisme, penyelundupan dan lain-lain. Pembangunan kepercayaan dan kerjasama antar negara dalam wilayah asia tenggara penting digalakan untuk mencegah gesekan-gesekan yang dapat memicu konflik lebih besar.

Perhimpunan negara-negara di asia tenggara yang dikenal dengan ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) merupakan mitra terdekat Indonesia dalam konteks hubungan regional. Sehingga dinamika yang terjadi pada lingkup ASEAN juga sedikit banyak berpengaruh terhadap domestik Indonesia. Kerjasama sama antar negara-negara ASEAN penting untuk dimakanai sebagai modal yang positif bagi Indonesia untuk mempertahankan kepentingannya sembari ikut terlibat dalam mewujudkan stabilitas regional dan global. Terlebih pada 2015, negara-negara ASEAN telah menandatangani deklarasi rancang biru pembentukan komunitas ASEAN 2015, yang mana dalam deklarasi tersebut komunitas ASEAN tersebut mencakup tiga hal pokok, yaitu politik-keamanan, sosial-budaya, dan ekonomi.

Sebagai negara kaya dan luas, serta memiliki jumlah penduduk yang besar dan majemuk, Indonesia mampu meneguhkan pengaruh dan kepemimpinannya dalam komunitas ASEAN dengan begitu secara aktif dan luas Indonesia mampu berperan dalam mendorong terwujudnya stabilitas kawasan, solidaritas antara anggota komunitas dan termasuk bersama-sama mengantisipasi ancaman keamanan, termasuk separatisme.

Namun yang perlu diperhatikan, bahwa Indonesia tidak hanya bertetangga dengan negara-negara di wilayah barat dan utara, melainkan juga di wilayah timur dan selatan. Sehingga hubungan bilateral maupun multilateral perlu juga dibangun secara baik oleh Indonesia pada negara-negara di timur dan selatan, sebagaimana hubungan baik dibangun oleh Indonesia dengan negara-negara di barat dan utara. Apalagi pada konteks Papua yang berasal dari ras Melanesia, memang sudah seharusnya Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara ber-ras Melanesia di timur dan selatan Indonesia. Belajar dari kasus Vanuatu, boleh jadi dukungan Vanuatu atas kemerdekaan Papua adalah buah dari tidak terbangunnya hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara di Timur dan Selatan Indonesia.

c. Nasional

1) Gatra Sosial Budaya. Perkembangan lingkungan strategis nasional dihadapkan dengan kondisi pendidikan, kesehatan dan spritual yang dilakukan oleh Pemerintah telah digiatkan oleh Kementerian/Lembaga melalui program-program yang menyentuh kehidupan masyarakat Papua. Pencanaan percepatan pembangunan Papua melalui RIPP tahun 2022-2041 yang bertujuan mewujudkan Papua yang Sehat, Cerdas dan Produktif merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan Papua.

2) Gatra Ekonomi. Perkembangan lingkungan strategis nasional khususnya Papua, ditandai dengan pembangunan yang lambat dan terpinggirkan. Banyak faktor yang dapat dilihat sebagai pemicunya, misalnya adanya ekspansi kapital ke dalam wilayah Papua dari perusahaan-perusahaan internasional dengan dalih investasi namun faktanya melakukan "invasi" sumber daya alam Papua.

3) Gatra Politik. Kebijakan politik pemerintah pusat yang inkonsisten khususnya terkait Otonomi Khusus, bahkan terbaru pemekaran Papua dan Papua Barat menjadi beberapa provinsi justru menyulut seteru masyarakat Asli Papua sebab dianggap mengacak-acak tatanan sosial-budaya setempat, bahkan kebijakan pemekaran murni adalah inisiatif pemerintah tanpa memberi kesempatan pada masyarakat Papua untuk menerima atau menolak.

4) Gatra Hankam. Penanggulangan ancaman keamanan di Papua juga masih menimbulkan kontroversi, sebab dirasa tidak memperhatikan kondisi psikologis masyarakat setempat dan tidak maksimal menggunakan pendekatan sosial dan budaya. Di sisi lain, meningkatnya aksi pemberontakan atau gangguan keamanan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang menuntut kemerdekaan di wilayah Papua, masih menjadi ancaman tersendiri, bahkan upaya disintegrasi yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai yang paling krusial bagi keutuhan NKRI saat ini. Di samping itu, korban sipil yang terus berjatuh akibat kekerasan bersenjata antara kelompok-

kelompok pro disintegrasi dengan TNI-Polri menjadi dilema dalam penanganan ancaman keamanan di Papua. Belum lagi aparat TNI-Polri yang tidak memiliki pemahaman memadai terkait aspek sosiologis, antropologis dan psikologis masyarakat Papua, sehingga kerap kali bertindak berlebihan terhadap masyarakat Papua. Hal ini juga turut melahirkan rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat kepada TNI-Polri yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya pencapaian tugas-tugas TNI-Polri di Papua.

5) Gatra Geografi. Dalam kacamata geo posisi, Papua adalah wilayah paling timur Indonesia yang sangat strategis. Papua adalah *choke point* bagi dua wilayah laut yakni Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur yang menjadi pusat tarik menarik pengaruh dan klaim antar blok dan negara. Papua sebagai wilayah Paling timur Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Australia, yang merupakan negara yang memfasilitasi berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat (AS). Singkatnya, menguasai Papua selain memiliki konsesi atas minyak, gas, emas dan potensi pertambangan lainnya, juga dapat menguasai daerah strategis sebagai *choke point* atas dua wilayah laut strategis.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Sebagaimana penjelasan pada bab-bab sebelumnya, bahwa perlu ada alternatif lain dalam menyelesaikan masalah Papua, pendekatan Pertahanan dan

Keamanan (Hankam) tidak lagi relevan atau setidaknya tidak bisa dijadikan satu-satunya alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan di tanah Papua. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih mampu menyentuh akar masalah di Papua dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Pendekatan sosial-budaya yang ditawarkan dalam Taskap ini, sama sekali tidak menafikan upaya-upaya pembangunan yang telah dan sedang dilakukan di Papua yang memang telah berupaya menggunakan pendekatan sosial budaya tersebut. Hanya saja berdasarkan data-data yang ada, perubahan yang terjadi di Papua tidak signifikan, bahkan dana otsus yang sedemikian besar, atau keseluruhan anggaran bantuan fiskal di wilayah Papua yang mencapai ribuan triliun, ternyata belum mampu dikonversikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua yang signifikan.

Wilayah Papua dalam banyak data BPS menunjukkan ranking atau skor yang rendah pada hampir semua indikator kesejahteraan, hal ini menjadi *challenge* atau tantangan yang sangat serius bukan saja bagi pemerintah Indonesia, melainkan juga kepada semua individu yang cinta dan peduli pada nasib Bangsa dan Negara Indonesia untuk mendorong Papua kepada kondisi yang jauh lebih baik. Apalagi dengan melihat target Indonesia Emas 2045, maka diperlukan kerja yang besar dan berat dalam menyiapkan terpenuhinya indikator-indikator target 2045 tersebut.

Pada bab ini, akan dibahas lebih lanjut terkait bagaimana pendekatan sosial-budaya perlu direvitalisasi dan mengapa hal itu perlu dilakukan agar tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Tentu pembahasan ini akan dimulai dengan melihat peta sosial-budaya Papua, faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pembangunan Papua atau pendekatan sosial budaya.

13. Kondisi Pembangunan dengan pendekatan Sosial Budaya Masyarakat Papua Saat Ini.

Salah satu modal utama dalam pembangunan adalah penduduk, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas penduduk yang menjadi objek pembangunan. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan

di Papua. Jumlah dan kualitas orang atau masyarakat Papua akan sangat menentukan program-program pembangunan yang dilakukan di tanah Papua.

Pembangunan ekonomi menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan di Papua dan harus dimulai dengan memberdayakan masyarakat Papua, khususnya OAP. Meningkatnya ekonomi akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Papua. Pemerintah memang harus betul-betul membaca Papua secara cermat, agar dapat mengidentifikasi apa masalah utama Papua dan harus diselesaikan mulai dari mana. Di sini pendekatan sosial-budaya menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, penting sekali untuk merevitalisasi pendekatan sosial budaya dalam pembangunan Papua, dengan menargetkan terpenuhinya indikator-indikator kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus benar-benar sungguh-sungguh mengupayakan pembangunan Papua dengan memaksimalkan penyerapan anggaran dana otsus, termasuk merancang, melaksanakan, memonitoring, mengawasi dan mengevaluasi program-program pembangunan masyarakat Papua.

a. Sosial Budaya Masyarakat Papua.

Sosial-budaya masyarakat Papua saat ini mencerminkan keragaman yang sangat kaya dan unik. Papua adalah rumah bagi lebih dari 300 kelompok etnis, masing-masing dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Kelompok-kelompok etnis ini, termasuk Dani, Asmat, Biak, dan Yali, memiliki bahasa, tradisi, dan seni yang khas. Bahasa-bahasa Papua mencerminkan kekayaan warisan budaya yang luar biasa dengan lebih dari 800 bahasa yang berbeda di provinsi ini. Seni dan kesenian tradisional, seperti ukiran Asmat dan tarian-tarian adat, memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan upacara-upacara adat.

Keberagaman sosial budaya di Papua juga ditandai dengan tingginya tingkat toleransi dan harmonisasi antar masyarakat. Kehidupan masyarakat di Papua sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan pentingnya persatuan dan kerukunan. Contohnya, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara (FORKOM-LKN) adalah inisiatif yang menunjukkan komitmen masyarakat Papua untuk menjaga harmoni sosial. Forum-forum ini berperan dalam

mempromosikan gotong royong dan kerjasama antar suku dan agama di Papua

Modernisasi di Papua terjadi bersamaan dengan upaya mempertahankan tradisi-tradisi lama. Meskipun banyak masyarakat Papua yang hidup dalam kehidupan modern, seperti di kota-kota besar, banyak juga yang tetap menjalankan kehidupan tradisional di pedesaan. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah bekerja sama dalam pelestarian budaya, termasuk melalui program pendidikan budaya dan dukungan untuk seniman lokal. Upaya ini penting untuk menjaga identitas budaya Papua di tengah pengaruh globalisasi yang semakin besar.

Gagalnya dana otsus, harus menjadi perhatian besar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya pada nilai dana yang dikeluarkan, tetapi juga akar masalah yang menjadi sebab dari semua permasalahan di Papua. Selain itu pemerintah pusat seharusnya tidak hanya berfokus pada pengucuran dana otsus, lebih dari itu pemerintah pusat juga berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan secara sungguh-sungguh agar dana otsus benar-benar dapat terserap sesuai peruntukannya, sehingga mampu berkonversikan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua secara signifikan. Sementara itu pemerintah daerah di wilayah Papua harus dipastikan memiliki kompetensi dan kapasitas dalam mengelola dana otsus yang sedemikian besar. Sehingga keduanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling bersinergi dan berkolaborasi secara baik dan sehat untuk mewujudkan Papua yang sejahtera.

Pemerintah telah mengambil langkah penanganan masalah Papua dengan pendekatan infrastruktur dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), meski bersamaan dengan itu pendekatan pertahanan dan keamanan pun masih digalakkan. Pendekatan infrastruktur yang digalakkan Pemerintah menargetkan hal-hal paling dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pendekatan pembangunan SDM diupayakan dengan mendorong peningkatan kesejahteraan lewat kebijakan afirmatif kepada Orang Asli Papua, dengan harapan dapat terpenuhinya hak-hak mereka yang selama ini belum optimal, termasuk dalam hal pendekatan budaya.

Meski demikian, langkah-langkah strategis yang telah dilakukan bersamaan dengan penggelontoran dana otsus atau keseluruhan dana dukungan fiskal bagi Papua, pada kenyataannya, berdasarkan publikasi data statistik yang ada, wilayah Papua termasuk Orang Asli Papua masih berada pada ranking paling bawah nyaris pada semua skor statistik pada aspek ekonomi, pendidikan, SDM, keamanan dan lain sebagainya. Belum lagi marjinalisasi Orang Asli Papua hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung rampung.

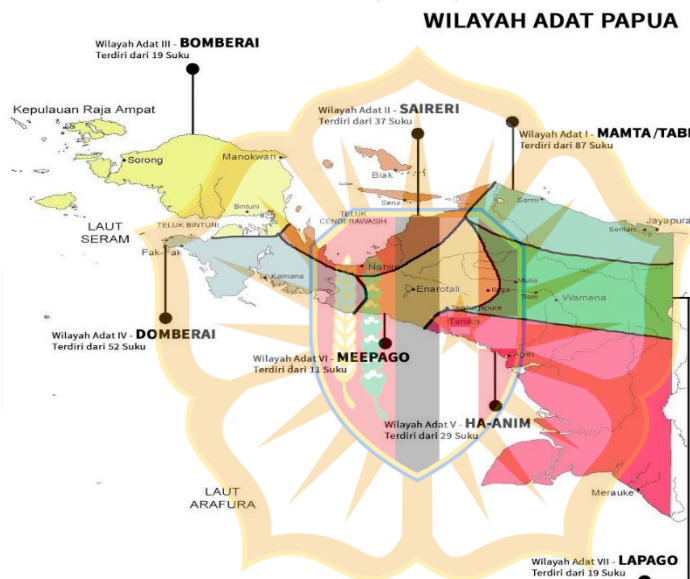
Dari faktor kesehatan Masyarakat Papua mengalami kondisi gizi buruk, tingginya tingkat kemiskinan yang ekstrem serta angka kejahatan yang tinggi sehingga hal ini juga menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini terhadap Papua dengan pendekatan sosial-budaya belum terlaksana secara maksimal, sehingga berdampak pada pembangunan masyarakat dan kebudayaan Papua yang timpang jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Negara Republik Indonesia.

b. Penentuan DOB keluar dari wilayah Adat.

Sebagaimana dilansir *suarapapua.com* dalam artikel yang berjudul “*Menggugat Tujuh Wilayah Adat di Tanah Papua,*” pembagian wilayah Papua ke dalam 7 wilayah adat menyebabkan suku-suku asli Nabire yang memiliki satu ciri budaya dengan wilayah adat Saireri malah dipaksa masuk ke dalam wilayah adat Mee Pago. Suku bangsa Kokonao yang satu ciri budaya dengan wilayah adat Bomberai juga dipaksa masuk ke dalam wilayah adat Mee Pago. Termasuk suku-suku bangsa di wilayah perbatasan seperti Ngalum, Apim, Mindiptana, Mandobo, sampai Keerom yang terhimpun dalam satu ciri kebudayaan yang sama, seharusnya digolongkan dalam satu wilayah adat tersendiri, namun faktanya dipaksa bergabung dengan wilayah adat Lapago, Mamta dan Anim Ha. Sehingga ada kecenderungan suku-suku bangsa yang kecil tidak memiliki eksistensi wilayah adat, melainkan hanya menempel pada suku-suku bangsa yang mayoritas atau yang lebih besar. Konsekuensinya, dalam kebijakan politik pembangunan daerah, keberadaan suku-suku bangsa yang mayoritas lebih determinan daripada suku-suku bangsa yang kecil atau minoritas.³³

³³ <https://suarapapua.com/2020/07/08/menggugat-tujuh-wilayah-adat-papua/> Diakses pada 20 April

Model pembagian Papua ke dalam 7 wilayah adat ini juga dijadikan dasar atas kebijakan politik pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, yang akhirnya memicu pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Ada sebagian masyarakat, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP) keberatan atas kebijakan tersebut, sebab dalam perubahan undang-undang tentang otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat justeru mengkebiri kewenangan MRP, serta beberapa masyarakat adat atau suku juga merasa keterwakilan mereka atau aspirasi mereka diabaikan oleh pemerintah pusat saat membuat kebijakan DOM atas wilayah-wilayah di Papua.



Gambar: Tujuh Wilayah Adat Papua³⁴

c. Sistem Kepemimpinan Papua

Papua sebagai suatu wilayah yang dihuni banyak Klan/Marga dan sub-sub klan, serta Kampung dan Etnik atau suku bangsa, tidak hanya memiliki kekayaan kebudayaan yang sangat beragam sebagai identitas bagi masing-masing kesatuan sosial yang ada, melainkan juga memiliki keanekaragaman sistem politik atau sistem kepemimpinan tradisional yang

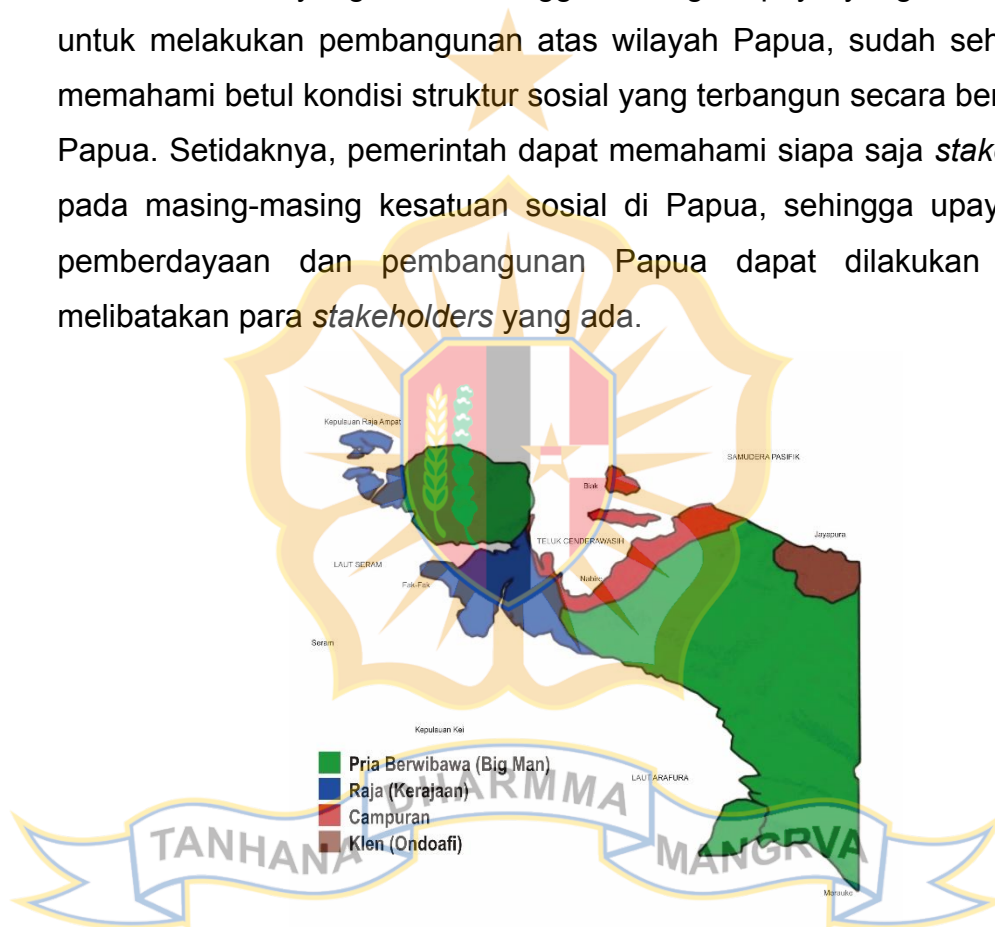
unik dan khas dari masing-masing kesatuan sosial tersebut. Hal ini perlu dipahami untuk mengetahui bagaimana tipe politik dari setiap kesatuan sosial yang ada di Papua, cara yang mereka tempuh untuk mendapatkan kursi kepemimpinan, serta mengidentifikasi siapa saja dan bagaimana *stakeholder* di masing-masing kesatuan sosial menjalankan perannya.

Sistem kepemimpinan di Papua, dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yang mana masing-masing jenis ini memiliki kekhasan dan warna politiknya sendiri. Adapun 4 jenis tersebut adalah:

- 1) Sistem Kepemimpinan Pria Berwibawa (*Big Man*), dianut oleh masyarakat Mee, masyarakat Malum, masyarakat Dani, masyarakat Asmat dan masyarakat Maybrat. Pada sistem ini kepemimpinan diperoleh berdasarkan suatu pencapaian, bukan warisan, sehingga kualitas seseorang menjadi syarat mutlak sebagai pemimpin;
- 2) Sistem Kepemimpinan Raja (Kerajaan), dianut oleh masyarakat Kepulauan Raja Ampat, daerah Semenanjung Onim (Fak-Fak), dan daerah Kaimana. Pada sistem ini kepemimpinan diperoleh bukan karena pencapaian melainkan sebagai warisan, kepemimpinannya dilegitimasi oleh agama/kepercayaan dan berorientasi religi, serta birokrasi atau spektrum dalam masyarakat pada jenis kepemimpinan ini sangat terbatas atau sempit;
- 3) Sistem Kepemimpinan Klan (Ondoafi), dianut oleh masyarakat yang mendiami Teluk Jayapura, yaitu masyarakat Tobati, masyarakat Enggros, masyarakat Kayubatu, dan masyarakat Nafri. Selain itu, sistem ini juga dianut oleh masyarakat yang mendiami Danau Sentani, dan masyarakat daerah Genyem. Rotasi kepemimpinan jenis sistem ini sama dengan sistem kepemimpinan raja/kerajaan, di mana kekuasaan atau kursi kepemimpinan didapatkan melalui warisan. Bedanya dengan sistem kepemimpinan raja/kerajaan, sistem kepemimpinan klan memiliki birokrasi atau spektrum yang jauh lebih luas, berorientasi ekonomi dan legitimasinya berdasarkan kekuatan, religi atau magis.
- 4) Sistem Kepemimpinan Campuran, dianut oleh masyarakat Biak, masyarakat Yapen, masyarakat Waropen, masyarakat

Mamberamo Raya, masyarakat Pesisir Nabire dan masyarakat pesisir Wasior. Sistem kepemimpinan tradisional campuran ini merupakan tipe campuran dari tiga kepemimpinan sebelumnya, yakni sistem kepemimpinan pria berwibawa sistem kepemimpinan raja dan sistem kepemimpinan klen.

Empat sistem kepemimpinan tersebut, mempengaruhi karakteristik masyarakatnya, serta model hubungan komunitas dalam kesatuan - kesatuan sosial yang ada. Sehingga berbagai upaya yang dimaksudkan untuk melakukan pembangunan atas wilayah Papua, sudah seharusnya memahami betul kondisi struktur sosial yang terbangun secara beragam di Papua. Setidaknya, pemerintah dapat memahami siapa saja *stakeholders* pada masing-masing kesatuan sosial di Papua, sehingga upaya-upaya pemberdayaan dan pembangunan Papua dapat dilakukan dengan melibatkan para *stakeholders* yang ada.

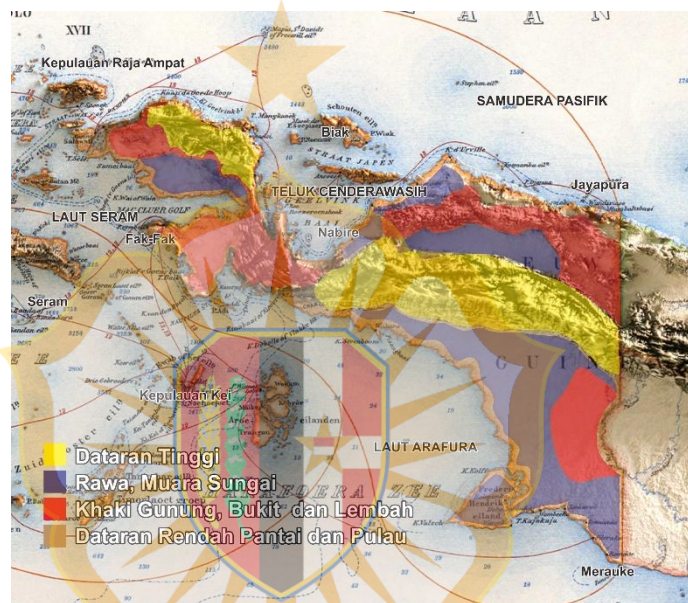


Gambar: Peta Empat Tipe Kepemimpinan Papua

d. Lingkungan ekologi

Strategi pembangunan di Papua seharusnya memperhatikan pola-pola adaptasi masyarakat Papua berdasarkan lingkungan ekologisnya. Termasuk misalnya program-program pemberdayaan di bidang ekonomi, tidak boleh mengabaikan kondisi lingkungan ekologis masing-masing wilayah, sebab dengan mempertimbangkan lingkungan ekologis masyarakat setempat, akan diperoleh data yang valid dan akurat tentang potensi asli

masyarakat lokal yang potensial untuk dikembangkan. Sebab, Papua harus dibangun berdasarkan kearifan lokalnya, dengan mengangkat dan mengembangkan sosial-budayanya. Pembangunan yang mengesampingkan sosial-budaya masyarakat setempat, hanya akan menghasilkan program-program yang tidak pernah tuntas, atau bahkan alih-alih menyelesaikan masalah justru menghasilkan masalah baru, seperti marjinalisasi masyarakat asli Papua dan membuat masyarakat Papua kehilangan identitas serta jati dirinya.



Gambar: Peta Empat Lingkungan Ekologi Papua

e. **Marjinalisasi Orang Asli Papua**

Peningkatan populasi Orang Asli Papua (OAP) menunjukkan ketimpangan dengan orang non OAP yang bermigrasi ke dalam wilayah Papua. Hingga saat ini belum ada data yang secara pasti menunjukkan berapa jumlah nyata OAP di wilayah Papua, di mana keseluruhan penduduknya mencapai lima jutaan penduduk. Namun hal yang menarik disampaikan dalam hasil penelitian Dr. Jim Elmslie dari Universitas Sidney pada akhir 2007. Dalam Penelitiannya Jim memprediksikan bahwa hingga 2030 pertumbuhan penduduk Papua akan didominasi penduduk non-Papua (pendatang). Bahkan lebih mengejutkan lagi, dalam penelitian yang dirilis *Indonesian Solidarity and the West Paper Project*, pada 9-10 Agustus di Sidney-Australia, menyebutkan bahwa mulai 2030 hingga 2050, Orang Asli

Papua (OAP) atau ras Melanesia akan musnah dari tanah kelahirannya. Jim menjelaskan bahwa ada peningkatan populasi yang timpang pada tiap tahunnya antara OAP dan non-OAP, di mana jumlah non-OAP meningkat sangat tajam akibat migrasi ke dalam Papua, sementara OAP justru mengalami perlambatan peningkatan populasi. Hal ini menyebabkan OAP justru menjadi minoritas di tanah kelahirannya sendiri.³⁵

Keterwakilan politik legislatif OAP di wilayah Papua juga sangat memprihatinkan, sebab justru OAP merupakan minoritas dalam jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di seluruh wilayah Papua.³⁶ Selain itu, dalam kehidupan keseharian, citra Orang Asli Papua bagi kebanyakan masyarakat non Papua, masih dilihat dengan kaca mata minus, artinya Orang Papua distigmakan dengan kebiasaan-kebiasaan tidak teratur, kolot, terbelakang, asing, dan bahkan dalam beberapa kasus, di tengah meningkatnya kemajuan teknologi dan peradaban manusia, sebagian kalangan malah masih berperilaku purba dengan memperlakukan Orang Asli Papua secara diskriminatif dan rasis.

Pada dasarnya, meningkatnya populasi penduduk di Papua Barat tidak disebabkan oleh tingginya angka kelahiran OAP, melainkan karena tingginya arus migrasi orang non OAP ke dalam wilayah Papua. Berdasarkan data BPS, selama berlangsungnya program transmigrasi dari tahun 1964 sampai 1999, telah ada 78.000 KK yang masuk ke dalam wilayah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).

Migrasi sendiri merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan menetap. Migrasi dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu migrasi risen dan migrasi seumur hidup. Migrasi risen adalah kabupaten/kota/provinsi tempat tinggal lima tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Sedangkan migrasi seumur hidup adalah kabupaten/kota/provinsi tempat lahir berbeda dari kabupaten/kota/provinsi tempat tinggal sekarang.

³⁵ Oktovianus Pogau, "Operasi Militer dan Depopulasi Orang Asli Papua," <https://suarapapua.com/2019/07/07/operasi-militer-dan-depopulasi-orang-asli-papua/>, 10 Juli 2024. Lihat juga, Peter King, Jim Elmslie dan Camellia Webb-Gannon, *Comprehending West Papua*, Centre For Peace and Conflict Studies: Sydney, 2011, hlm. 237.

³⁶ Humas DPRD, "Keterwakilan OAP di DPRD se-Papua Sangat Minim," <https://dpr-papua.go.id/keterwakilan-oap-di-dprd-se-papua-sangat-minim>, 23 Februari 2024.

Selain itu, dalam kehidupan keseharian, citra Orang Asli Papua bagi kebanyakan masyarakat non Papua, masih dilihat dengan kaca mata minus, artinya Orang Papua distigmakan dengan kebiasaan-kebiasaan tidak teratur, kolot, terbelakang, asing, dan bahkan dalam beberapa kasus, di tengah meningkatnya kemajuan teknologi dan peradaban manusia, sebagian kalangan malah masih berperilaku purba dengan memperlakukan Orang Asli Papua secara diskriminatif dan rasis.

Revitalisasi pendekatan sosial-budaya dalam menyejahterakan masyarakat Papua harus menjadikan isu marginalisasi ini sebagai peringatan penting, bahwa pembangunan Papua harus benar-benar menghapus marginalisasi tersebut. Segala upaya untuk memenuhi indikator-indikator masyarakat sejahtera harus diwujudkan tanpa diskriminasi, rasisme atau meminggirkan Orang Asli Papua secara khusus dan semua masyarakat yang mendiami wilayah Papua pada umumnya.

f. **Ancaman Disintegrasi.**

Ancaman disintegrasi Papua dapat dikatakan sebagai isu paling sensitif di Republik ini, apalagi melihat ragam interpretasi sejarah Papua, yang satu pihak mengklaim Papua bagian dari Indonesia adalah final, sementara lainnya meyakini masuknya Papua ke dalam Indonesia adalah bentuk kolonialisasi dan skandal nasionalisme sejak awal Republik Indonesia berdiri.

Pada dasarnya menyatunya Papua ke dalam Indonesia merupakan buah dari kolonialisasi barat (Eropa), di mana wilayah Papua dan wilayah Indonesia lainnya adalah bekas jajahan Belanda, hanya itu. Namun, berkaca pada daerah lainnya yang juga bernasib sama seperti Papua (tergabung ke dalam Indonesia karena faktor penjajahan Belanda), dan tetap utuh sebagai bagian dari Indonesia tanpa adanya riak-riak separatisme dan upaya memerdekakan diri dari Indonesia, patut menjadi pertanyaan, apa akar dari ancaman disintegrasi Papua? Tentu bukan hanya faktor interpretasi sejarah. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi usaha pemisahan diri Papua dari Indonesia, bukan saja persoalan interpretasi sejarah tadi, melainkan identitas kebangsaan, kebudayaan, ras dan berbagai ketimpangan yang

dialami Papua.

Perubahan budaya yang terjadi diakibatkan adanya kebijakan-kebijakan yang di dalamnya berupaya menghegemoni kebudayaan lokal dengan kebudayaan yang dianggap lebih modern. Salah satu bentuk kebijakan kolonial adalah diterapkannya sistem *Onderfdeling* pembagian wilayah administratif Nugini-Belanda, sasarannya adalah membentuk masyarakat Papua menjadi lebih modern. Sasaran kebijakan *Onderfdeling* ini adalah sikap yang dianggap perlu diambil terhadap kebudayaan yang dianggap tidak perlu.³⁷

Hulu dari ancaman disintegrasi ini lah yang perlu diurai oleh pemerintah, agar strategi mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, dapat dilihat dan dilakukan tidak hanya dengan pendekatan pertahanan dan keamanan yang seringkali mengabaikan akar masalah, memaksakan nasionalisme dengan senjata dan telunjuk. Sebab nasionalisme yang sejati muncul dari kesadaran setiap anak bangsa, ada rasa memiliki terhadap bangsa dan negaranya, dan hal ini bisa terjadi apabila negara benar-benar hadir sebagai pelindung dan penjamin bagi hak-hak asasi tiap-tiap warga negaranya.

Kegagalan pemerintah dalam menjamin keadilan sosial bagi rakyatnya, akan memicu perlawanan dan pembangkangan, sebab tidak akan ada masyarakat yang mau terus-terusan hidup dalam keterpurukan, konflik dan kekerasan. Pada konteks Papua, menarik apa yang dikatakan Paskalis Kosay, bahwa sebagian orang Papua meyakini upaya melepaskan diri dari penderitaan konflik, kekerasan dan keteringgalan pembangunan adalah suatu jalan kebenaran dalam rangka perjuangan ideologi nasionalisme Papua untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kosay menambahkan bahwa keyakinan akan kebenaran ideologi tersebut semakin tumbuh subur ketika orang Papua mengalami ketidakadilan, konflik, kekerasan dan kemiskinan dalam dinamikan kehidupannya. Apalagi benih-benih ideologi itu memang telah tertanam begitu kuat sejak pengalaman buruk masyarakat Papua di masa lalu.³⁸

³⁷ Pim Schoorl, *Belanda Di Irian Jaya*, (Jakarta : Gerba Budaya, 2001), hlm. 7

³⁸ Paskalis Kosay, *Konflik Papua, Akar Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Tollelegi, 2011), hlm.

Ancaman disintegrasi Papua sangat berkait erat dengan persoalan pertahanan dan keamanan yang masih menjadi masalah krusial hingga hari ini. Berdasarkan laporan Statistik Kriminal tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, tercatat Provinsi Papua Barat berada pada urutan pertama sebagai wilayah dengan resiko terkena kejahatan, menyusul pada urutan ke enam adalah Provinsi Papua. Hal ini menggambarkan bahwa baik Provinsi Papua Barat maupun Provinsi Papua berada pada tingkat resiko terkena kejahatan tertinggi di Indonesia.

Tingkat kekerasan di wilayah Papua juga terus meningkat tiap tahunnya, merujuk laporan dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Edisi 31 Maret 2022, sejak 2010 frekuensi dan intensitas kekerasan di Papua mengalami fluktuasi dan kenaikan cukup tajam. Intensitas paling tinggi terjadi pada periode 2019-maret 2022, di mana terjadi peningkatan signifikan baik dari sisi frekuensi dan jumlah korban maupun variasi motif dan jenis tindak kekerasan.

Jumlah kekerasan di wilayah Papua dari 2010 hingga maret 2022 tercatat berjumlah 348 kasus dengan korban berjumlah 2118 jiwa. Kasus kekerasan ini melibatkan warga masyarakat baik penduduk asli maupun pendatang, aparat keamanan dan Kelompok Kriminal Bersenjata – Kelompok Separatis Bersenjata (KKB-KSB) ataupun TPNPB-OPM,³⁹ dengan 4 (empat) pengelompokan motif konflik, yaitu 1) motif separatisme yang menyangkut aspirasi kemerdekaan; 2) Motif politik lokal yang berhubungan dengan kontestasi politik, seperti pilkada dan rekrutmen birokrasi; 3) Motif sosial budaya, seperti konflik antarsuku Papua atau konflik orang asli Papua vs bukan orang asli Papua; dan 4) Motif ekonomi yang terkait dengan kontestasi sumber daya, seperti konflik antara masyarakat vs korporasi dan atau pemerintah atau konflik antar kelompok masyarakat atas akses terhadap sumber daya ekonomi.⁴⁰

Deretan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, turut menghambat rekonsiliasi atau upaya memenangkan hati masyarakat

99.

³⁹ Bambang Purwoko (*et.al*), *Tindak Kekerasan di Papua (Januari 2010 – Maret 2022)*, Edisi Maret 2022, Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2022, hlm. 6.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 20

Papua, yang pada gilirannya tidak dapat meluruhkan niat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pelanggaran HAM menambah deretan ketimpangan pembangunan Papua dengan daerah lainnya di luar wilayah Papua. Maka penting untuk melihat Papua secara lebih komprehensif, sehingga berbagai upaya protes atau riak-riak perlawanan pada masyarakat Papua tidak serta merta disikapi dengan pendekatan keamanan atau militer, melainkan dengan melihat hulu dari setiap masalah dan pemecahannya pun mesti dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

Sehingga mencari alternatif lain dalam menyelesaikan masalah adalah niscaya, dan menurut hemat penulis, pendekatan yang paling memungkinkan adalah pendekatan sosial budaya, di mana persoalan Papua tidak lagi terfokus pada pertahanan dan keamanan, atau minimal paralel dengan pendekatan tersebut, pendekatan sosial-budaya harus direvitalisasi dan menjadi gaung bagi proyek besar membangun Papua.

14. Faktor Penghambat Dan Pendorong Dalam Pendekatan Sosial Budaya Yang Telah Dilakukan

a. Faktor penghambat

- 1) Ancaman
 - a) Masalah Keamanan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, masalah keamanan adalah persoalan yang cukup krusial di wilayah Papua. Hal tersebut menyebabkan terganggunya stabilitas dan keeluasaan dalam membangun Papua. Pendekatan sosial-budaya pun menjadi sangat berat, sebab sebagian masyarakat Papua yang tergabung dalam kelompok pendukung disintegrasi maupun simpatisannya masih bersikap antipati kepada segala upaya pembangunan yang mengatasnamakan Indonesia.

Pendekatan sosial-budaya yang dimaksudkan dengan menggali, mengenali dan memaksimalkan kearifan lokal serta penanganan masalah berdasarkan dinamika asli masyarakat Papua, untuk membangun pendidikan dan SDM, membangun

kesehatan dan tingkat harapan hidup, memperkuat basis ekonomi melalui pemberdayaan dan lain sebagainya, menjadi sangat berat, sebab berhadapan dengan kondisi wilayah yang rawan terhadap kekerasan dan kejahatan. Kondisi keamanan wilayah yang rawan juga turut berpengaruh pada ketersediaan guru dan tenaga kesehatan.

b) Ekspansi Kapital

Adanya ekspansi kapital dari perusahaan-perusahaan internasional dengan dalih investasi namun faktanya melakukan “invasi” sumber daya alam Papua, serta elit-elit dalam lingkaran pemerintahan yang disinyalir turut bermain dalam bisnis pengerukan SDA di wilayah Papua, yang berakibat pada terkonsentrasinya hasil kekayaan alam Papua itu kepada sekelompok orang tertentu daripada dinikmati secara luas dan maksimal oleh masyarakat asli Papua sebagai pemilik sah SDA Papua, menjadi ancaman yang memicu kecemburuan dan pemberontakan.

Selain itu budaya korupsi masih menjadi persoalan serius di wilayah Papua, selain karena kapasitas dan kapabilitas pengelolaan anggaran yang lemah, kesadaran untuk membangun Papua secara sungguh-sungguh juga belum sepenuhnya terbangun, hal ini misalnya terlihat pada tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada pengembangan pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan lain sebagainya.

c) Marjinalisasi

Marjinalisasi OAP -sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu- merupakan ancaman bagi pendekatan sosial-budaya dalam pembangunan Papua yang selama ini diupayakan. Bagaimana tidak, isu marjinalisasi ini turut menyulut bahkan menambah bara kebencian kepada

nasionalisme Indonesia, yang pada gilirannya menjustifikasi perlawanan atau pemberontakan di wilayah Papua yang mendukung disintegrasi Indonesia. Meningkatnya isu marginalisasi ini, berdampak secara serius pada jatidiri Orang Asli Papua dan mendorong meningkatnya dampak negatif secara psikologis, di mana Orang Asli Papua merasa bukan bagian dari Indonesia dan merasa tidak memiliki ikatan batin dengan sejarah Bangsa Indonesia secara umum.

d) Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM adalah isu paling sensitif dan sering digaungkan dalam forum-forum Internasional. Isu HAM ini pula yang seringkali dipakai sebagai bahan untuk menumbuhkan perlawanan kepada nasionalisme Indonesia dan ketidakpercayaan kepada entitas Indonesia sebagai wadah yang mendatangkan keadilan serta kebahagiaan OAP.

Isu HAM ini turut menyumbang faktor penghambat pendekatan sosial-budaya dalam pembangunan di wilayah Papua. Dampak dari pelanggaran HAM yang cukup tinggi intensitasnya di Papua, di antaranya adalah rendahnya keinginan tenaga-tenaga profesional untuk mengabdikan dan mengisi pos-pos pembangunan masyarakat Papua baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan.

2) Kelemahan

a) SDM Rendah

Salah satu “bahan bakar” pembangunan di wilayah Papua dengan pendekatan sosial-budaya adalah tingkat kualitas sumberdaya manusianya. Jika SDM rendah, upaya-upaya yang dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat Papua menjadi hal yang tidak mudah. Lemahnya SDM mengakibatkan sulitnya masyarakat setempat untuk dirangkul dalam upaya membantu memaksimalkan potensi mereka dan

ajakan untuk sama-sama memikirkan serta membangun wilayah Papua menjadi tidak begitu tergaung.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, keterlibatan OAP dalam pemerintahan yang minim, serta eksistensi MRP yang tidak berdampak atau terkerdilkan, sebenarnya cukup berdampak bagi lemahnya pemahaman sosial-budaya masyarakat di wilayah Papua oleh para pemangku kebijakan, sehingga seringkali kebijakan yang muncul bias dengan kondisi sosial budaya masyarakat asli Papua. Namun apabila ditarik lebih jauh, rendahnya keterlibatan OAP dalam pemerintahan, salah satu faktornya adalah kualitas SDM-nya yang rendah.

b) Akses Distribusi Kurang Memadai

Akses distribusi merupakan hal yang cukup vital dalam menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, termasuk barang-barang serta berbagai keperluan masyarakat. Namun dengan medan wilayah Papua yang umumnya sulit ditempuh dengan jalur darat, menyebabkan upaya-upaya pendekatan sosial budaya menjadi lemah. Sebagian besar jalur distribusi masyarakat Papua hari ini, mengandalkan transportasi pesawat udara. Meskipun dapat meringkas perjalanan, transportasi udara tidak dapat melakukan perpindahan barang atau pendistribusian logistik dan kebutuhan masyarakat lainnya secara besar sekaligus. Akses jalan dan jembatan menjadi kebutuhan vital yang tidak terelakkan untuk menunjang jalur pasok distribusi masyarakat di wilayah Papua.

c) Krisis Nasionalisme

Hilangnya perekat bangsa akibat sikap oportunistis kekuasaan, praktik kekuasaan yang tidak berpihak selama bertahun-tahun, serta berbagai permasalahan krusial di

wilayah Papua yang tidak juga terselesaikan, turut menjadi sebab kepercayaan rakyat kepada penguasa semakin menurun, yang pada gilirannya mengikis semangat nasionalisme OAP dan melahirkan perlawanan bersenjata. Krisis nasionalisme ini adalah hal yang menyebabkan lemahnya kemampuan membangun Papua dengan pendekatan sosial-budaya. Ketimpangan pembangunan wilayah Papua dengan wilayah lainnya di Republik Indonesia, serta marjinalisasi dan diskriminasi yang terus terjadi, turut menumbuhsururkan krisis nasionalisme di Papua. Hal ini berdampak secara serius kepada proses-proses pembangunan di tanah Papua, sebab masyarakat Papua tidak merasa menjadi bagian dari Indonesia dan perasaan curiga terhadap pemerintah Indonesia yang terus terpupuk, yang pada gilirannya sebagian masyarakat Papua memilih jalan sebagai separatis dan memberontak melawan pemerintah Indonesia.

b. Faktor pendorong

- 1) Peluang
 - a) Potensi SDA

Pada dasarnya potensi SDA yang dikandung tanah Papua, dapat menjadi modal besar bagi pembangunan Papua dengan pendekatan sosial budaya. Pengelolaan SDA yang tepat yang berdampak positif bagi OAP dan tanah leluhurnya, sejatinya adalah kelebihan luar biasa yang dapat dijadikan bahan bakar dalam pembangunan wilayah Papua dengan pendekatan sosial budaya.

Pada teori kesejahteraan sosial, mensyaratkan ketersediaan material sebagai modal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan adanya kekayaan SDA yang melimpah, seharusnya dapat mendorong ketersediaan material demi terwujudnya peningkatan kualitas

hidup masyarakat Papua. Kekayaan SDA Papua seharusnya dapat menjadi modal yang sangat besar untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.

b) Potensi Kebudayaan

Sama halnya dengan kekayaan SDA, wilayah Papua juga memiliki kekayaan kebudayaan yang tidak bisa dibilang kecil. Keunikan dan keanekaragaman suku di wilayah Papua turut mendorong peningkatan pembangunan Papua dengan pendekatan sosial budaya. Merujuk Teori Pemberdayaan dan Pembangunan, pembangunan masyarakat dilakukan secara terstruktur, terprogram, dan ditujukan untuk memperluas jaringan komunitas lokal dalam rangka menggapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Subjek sekaligus objek dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat adalah komunitas lokal masyarakat itu sendiri, hal itu berarti masyarakat lokal beserta seperangkat kebudayaannya adalah faktor primer dalam proses pembangunan. Maka keanekaragaman kebudayaan masyarakat Papua sejatinya adalah modal besar bagi upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan di tanah Papua.

Apabila potensi kebudayaan ini dapat dikelola dan dikembangkan secara baik dan benar, bukan tidak mungkin Papua dapat berubah menjadi salah satu bagian dari Negara Indonesia yang maju dan menjadi wilayah dengan kebudayaan paling majemuk yang mampu mengkonsolidasikan keanekaragaman kebudayaannya menjadi suatu kekuatan untuk berkembang dan maju.

c) Geostrategis

Sebagai wilayah dengan posisi strategis baik dalam hal jalur lintas antar pulau dan/atau laut, maupun sebagai wilayah

yang menjadi tujuan pengelolaan SDA, mampu memiliki *value* tersendiri yang membuat wilayah Papua tidak selalu dipandang sebelah mata. Hal ini berdampak positif bagi pembangunan dengan pendekatan sosial budaya di Papua. Wilayah Papua juga merupakan *choke point* yang memiliki nilai strategis dalam pertahanan dan keamanan. Selain itu, sebagai wilayah dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang luar biasa, posisi Papua menjadi daya tawar dalam politik dan ekonomi, termasuk pertahanan dan kemananan.

Merujuk Teori Pertahanan dan Keamanan, letak strategis suatu wilayah dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan stabilitas keamanan, selain menjadi *bargaining* untuk memainkan peran strategis di wilayah tersebut. Apabila posisi strategis Papua mampu dikelola secara baik, benar dan tepat, maka Papua akan menjadi benteng paling timur Republik Indonesia yang sangat kuat dan menentukan.

2) Kekuatan

a) Otonomi Khusus (Otsus)

Meski menimbulkan perdebatan di sana sini, serta memicu seteru yang tiada berkesudahan hingga saat ini, di mana wilayah Papua telah dimekarkan menjadi beberapa provinsi dalam bingkai daerah otonomi khusus, sejatinya otsus dapat menjadi kekuatan luar biasa besar bagi pembangunan Papua. Hal ini cukup terbukti dalam pembangunan wilayah Papua sejauh ini.

Meski belum maksimal dan tentu saja melahirkan banyak catatan merah bagi pemerintah baik daerah maupun pusat, bagaimana pun otsus telah cukup memberi warna pada pendekatan sosial budaya dalam pembangunan wilayah Papua. Selain sebagai “diplomasi politik,” Otsus dapat menjadi langkah yang tepat untuk memberikan keistimewaan dan pelimpahan kewenangan kepada wilayah Papua untuk

secara mandiri dan bebas membangun jati dirinya dan menguatkan identitas kebudayaannya.

b) Berbagai Aturan Pendukung

Apabila dilihat dari awal dibuatnya kebijakan otsus hingga saat ini, telah banyak regulasi yang dilahirkan untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan Papua dalam bingkai otsus. Regulasi-regulasi tersebut cukup menjadi dasar hukum dan kekuatan bagi para pihak untuk terus membangun Papua dengan memperhatikan pendekatan sosial-budaya

15. Revitalisasi Pendekatan Sosial Budaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua Dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan data-data yang ada, tidak dapat dipungkiri Papua adalah salah satu provinsi Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan kebudayaan yang luar biasa besarnya, sayangnya hal tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Menurut data statistik yang dipublikasikan, menunjukkan bahwa kemiskinan, krisis kesehatan, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan masalah keamanan adalah momok yang berpuluh tahun menyelimuti tanah Papua. Anomali ini tidak dapat disangkal telah turut melahirkan konflik tidak berkesudahan di tanah Papua, karenanya ada dua isu besar yang akan terus disinggung apabila mengangkat tema Papua, yakni keadilan sosial dan ancaman disintegrasi sesuai dengan faktor penghambat dalam pembangunan Papua menuju kesejahteraan masyarakatnya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, namun dalam dekade-dekade terakhir alternatif yang masih menjadi fokus selain pembangunan infrastruktur dalam penyelesaian masalah Papua adalah pertahanan dan keamanan (Hankam), faktanya alternatif yang mengedepankan penanganan represif tersebut tidak cukup mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Sedangkan pendekatan sosial-budaya yang telah dilakukan, misalnya lewat program-program dalam kebijakan otonomi khusus, juga belum maksimal sehingga tidak memberikan perubahan

yang signifikan di tanah Papua.

Berdasarkan Grand Theory Kesejahteraan menurut Bentham bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Sehingga menyelesaikan masalah Papua diperlukan pendekatan lain sebagai alternatif menyelesaikan masalah Papua, yang dalam Taskap ini penulis berkeyakinan bahwa pendekatan sosial-budaya dengan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua lewat beberapa hal dari 8 (delapan) indikator kesejahteraan menurut BPS, yakni kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, kemiskinan dan sosial lainnya. Hal ini perlu dijadikan fokus atau direvitalisasi dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah di Papua, ikhtiar ini sangat perlu sebagai jalan menuju tercapainya visi besar Indonesia Emas 2045.

Sudah seharusnya melihat Papua tidak lagi dengan kaca mata perang, bedil, permusuhan, militeristik dan segala bentuk upaya represif lainnya. Narasi yang mengarah kepada kebencian dan meruncingkan pertentangan antara kelompok pemberontak dengan pemerintah Indonesia, termasuk TNI-POLRI yang bertugas di lapangan, harus diminimalisir. Sebab tidak boleh ada usaha adu domba atau memupuk perseteruan antara sesama anak bangsa. Lagi pula pendekatan represif tidak akan pernah merebut hati para pemberontak, melainkan semakin mengobarkan api perlawanan. Selain itu “penegakan hukum” jangan hanya dipakai sebagai dalih dalam melawan kelompok pemberontak, kebijakan melawan pemberontak itu sendiri pun harus didasari oleh komitmen kepatuhan pada hukum dan aturan yang berlaku.

Adapun upaya-upaya praktis yang dapat dilakukan untuk membangun Papua melalui pendekatan Sosial Budaya, yaitu sebagai berikut:

a. Peningkatan Infrastruktur Lembaga Pendidikan/Latihan Terintegrasi.

Salah satu kunci suksesnya pembangunan adalah terbentuknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Sebab SDM adalah motor penggerak perubahan masyarakat, semakin baik SDM-nya maka masyarakat akan bergerak kepada peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, sebaliknya apabila SDM-nya buruk, maka dapat dipastikan masyarakat

akan bergerak ke arah ketidakstabilan dan kemerosotan.

Menurut teori pemberdayaan dan pembangunan dalam buku Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan*; (2014) bahwa pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebebasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber daya produktif. Dalam teori tersebut mengandung makna bahwa dalam pemenuhan kebutuhan tersebut dibutuhkan suatu peningkatan kemampuan dan dalam meningkatkan kualitas SDM ini dibutuhkan suatu pendidikan yang memadai dengan menyiapkan infrastruktur pendidikan yang layak.

Salah satu infrastruktur penting yang perlu dibangun untuk menuntaskan masalah Papua berdasarkan cita rasa sosial-budaya Papua adalah dengan membangun *Boarding School* yang modern dan integrasi-interkoneksi. Modern karena fasilitas, manajemen sampai dengan kurikulum yang dibuat disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi. Terintegrasi-interkoneksi karena *Boarding School* bukan sekedar lembaga sekolah semata, melainkan semacam suatu ekosistem yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas layaknya “kota kecil”, serta *Boarding School* terhubung dengan berbagai jaringan-jaringan pendidikan, penelitian, institusi TNI dan Polri, dan lain sebagainya.

Infrastruktur lebih luas yang juga dimaksud dalam Taskap ini berupa Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dilindungi TNI-Polri, lembaga pengembangan dan pelestarian kebudayaan Papua serta infrastruktur vital di kampung-kampung di seluruh Papua, termasuk sarana telekomunikasi yang memadai di seluruh penjuru tanah Papua.

Selain itu membangun infrastruktur Sumber Daya Manusia di tiap-tiap wilayah di seluruh tanah Papua. Infrastruktur ini dapat berupa sarana-sarana pengembangan diri dan potensi masyarakat lokal, seperti balai latihan pembuatan makanan olahan, balai latihan pembuatan pakan ternak, balai latihan pembibitan dan pemeliharaan tanaman, balai latihan ekonomi kreatif dan lain sebagainya, yang mana di tiap-tiap wilayah tersebut disediakan fasilitator atau *project officer* yang terlatih dan berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat.

Lembaga pendidikan yang ada di Papua dibangun dalam setiap provinsi dengan memperhatikan pada tingkat kondisi sosial budaya yang menyangkut pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun Boarding School yang dimaksud dibangun dengan konsep sebagai berikut:

1) Kepentingan bagi ASN.

Elemen penting dalam pembangunan di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu alat kelengkapan negara terutama meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Sebagai penyelenggara pemerintahan, ASN memiliki tanggungjawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat.

Komptensi dasar yang harus dimiliki ASN adalah kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural (vide, Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan). Pada konteks pembangunan Papua, dengan kondisi sosial-budaya yang sangat beragam dan rumit, tentu membutuhkan ASN yang andal dan memiliki seperangkat kapasitas serta kapabilitas yang mumpuni untuk mampu memberikan pelayan publik yang adil, demokratis dan bermartabat. ASN yang hanya bekerja karena gaji, waktu dan secara seenaknya, hanya akan melahirkan ketidakpuasan dan sikap pesimis masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, kondisi ini semakin parah apabila elit-elit dalam pemerintahan malah sibuk memperkaya diri sendiri, sementara ASN di bawahnya bekerja tanpa kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan pelayanan publik.

Maka sangat dibutuhkan suatu upaya yang sungguh-sungguh, terukur, dan konkret dalam membangun kualitas SDM para ASN di semua daerah, khususnya di wilayah Papua. ASN di wilayah Papua haruslah benar-benar terpilih dari putra-putri Bangsa yang terbaik secara intelektual, keterampilan dan kesungguhan dalam pengabdian kepada negara. Selain itu, mereka yang telah terpilih sebagai ASN harus terus dijaga dan ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya

melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) secara berkala dan terencana dengan baik.

Terhadap ASN di Papua, diperlukan suatu kebijakan dan manajemen yang berpijak pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan dengan alasan apapun (Vide, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). Adapun Pendidikan dan Pelatihan kepada ASN di Papua, dilakukan dengan memperhatikan perkembangan zaman dan kearifan lokal sosial budaya Papua. Pendidikan dan Pelatihan bukan sebuah agenda formalitas untuk sekedar memenuhi program kerja, melainkan upaya sungguh-sungguh untuk membentuk insan ASN yang memiliki profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada Publik di Papua.

Fungsi *Boarding School* selain sebagai lembaga pendidikan bagi siswa maka dapat juga dijadikan sebagai lembaga pendidikan daerah bagi ASN, dengan adanya *Boarding School* ini di tiap wilayah Provinsi Papua maka kualitas ASN dapat dikembangkan sedemikian rupa dan dapat terlaksananya efektifitas dan efisiensi waktu dan anggaran.

2) Kepentingan bagi Pelajar/Siswa.

- a) Diperuntukkan khusus untuk anak-anak Orang Asli Papua dan pendatang yang sudah lama di Papua, yang dipilih melalui suatu mekanisme seleksi secara ketat dan transparan dan merupakan perwakilan dari tiap-tiap daerah atau kabupaten kota;
- b) Anak-anak Orang Asli Papua yang direkrut ke dalam institusi pendidikan ini, diambil 100 orang dari masing-masing wilayah Kabupaten Kota di seluruh tanah Papua dimulai dari usia kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD);
- c) Setiap anak yang direkrut wajib mengikuti pendidikan dan tinggal di asrama yang disediakan dari SD sampai dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, kemudian akan

dikirim untuk melanjutkan pendidikan kesarjana ke universitas-universitas terbaik di Indonesia, yang mana semua biaya pendidikan dan kebutuhan hidup (makan dan tempat tinggal) ditanggung negara;

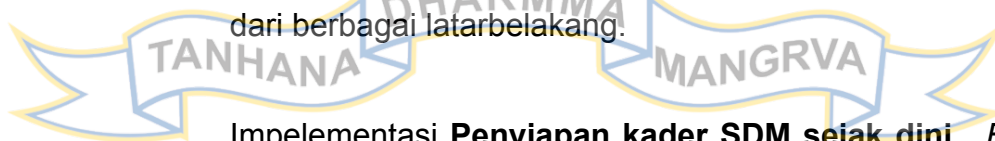
d) Boarding School dibangun dengan konsep yang modern dan dengan difasilitasi yang lengkap dari gedung pendidikan, asrama, unit kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas keagamaan, laboratorium atau gedung penelitian, unit keamanan dari institusi TNI-Polri, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya;

e) Tenaga pengajar, dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan lembaga adalah orang-orang terbaik dari lulusan terbaik di universitas-universitas ternama dari dalam dan luar negeri;

f) Memiliki kurikulum khusus berstandar internasional dan nuansa serta corak institusi dibentuk berdasarkan kearifan lokal atau disesuaikan dengan sosial-budaya Papua;

g) Minat dan bakat peserta didik telah diidentifikasi dan diasah sejak menginjak Sekolah Dasar;

h) Boarding School ini mengusung konsep inklusi yang bebas dari diskriminasi dan secara terbuka memberikan kesempatan kepada seluas-luasnya masyarakat Asli Papua dari berbagai latarbelakang.



Implementasi **Penyiapan kader SDM sejak dini**, *Boarding School* yang ditawarkan dalam Taskap ini bukan sekedar sekolah yang menerapkan pemondokan atau karantina bagi peserta didiknya, namun lebih dari itu adalah institusi pendidikan khusus yang modern dan terintegrasi-interkoneksi yang dibangun satu tiap provinsi di tanah Papua dan diperuntukkan khusus untuk putra-putri Orang Asli Papua serta penderitanya sebagai penyeimbang.

a) Program Pendidikan berkelanjutan dalam menciptakan bibit unggul selama 20 tahun.

(1) Program SD 12 Tahun Berkelanjutan (100 Kader Tiap Provinsi)

Peserta didik di Boarding School diwajibkan mengikuti pendidikan dan karantina atau pemondokan sampai lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau selama 12 tahun. Peserta didik diambil 100 orang dari tiap-tiap kabupaten-kota di seluruh Papua setiap tahunnya dimulai dari kelas 1 (satu) SD; Dalam 100 orang perprovinsi diambilkan dari perwakilan tiap – tiap kabupaten secara terpilih dan terseleksi. Maka secara keseluruhan akan ada 600 orang dari 6 provinsi. Pendidikan ini dimulai dari kelas 1 SD s.d Kelas 12 SMA.

(2) Program 4 Tahun Tugas Belajar ke Universitas Terkemuka Indonesia

Setelah peserta didik lulus SMA, semua wajib mengikuti program pendidikan lanjutan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing di seluruh Perguruan Tinggi Terbaik di wilayah Republik Indonesia, dengan maksimal lama kuliah 4 (empat) tahun, di mana biaya pendidikan dan kehidupan ditanggung negara. Tiap-tiap calon mahasiswa dari lulusan Boarding School ini akan diklasifikasi minat dan bakatnya ke dalam beberapa kategori, yaitu Sains dan Teknologi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Kedinasan, Kesehatan, TNI-POLRI dan Teknik. Calon mahasiswa dari masing-masing minat tersebut akan dikirim ke universitas-universitas dan akademi terkait yang terbaik di Indonesia untuk dididik menjadi ahli-ahli di bidangnya masing-masing, tentunya penempatan mereka di Universitas tersebut tidak diasramakan seperti saat ini, namun dengan penitipan di masyarakat/pejabat terkait secara menyebar sehingga akan terjadinya suatu proses asimilasi.

(3) Program 2 Tahun Pengabdian Luar Papua.

Setelah peserta didik lulus Sarjana Strata Satu/Sederajat, diwajibkan untuk melakukan pengabdian di lembaga, instansi atau di tempat-tempat yang telah di tentukan di luar pulau Papua selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa putus, sebagai bentuk studi banding atau proses belajar yang nantinya pengalaman dan pengetahuan terbaik yang didapatkan selama pengabdian 2 (dua) tahun diterapkan di tempat penempatan di Papua. Selama masa pengabdian ini setiap peserta didik diwajibkan mengikuti semua proses secara baik dan akan diawasi secara ketat dengan berbagai peraturan yang menunjang;

(4) Program 2 Tahun Pengkaryaan Sesuai Provinsi Asal (Dalam Pengawasan Ketat).

Setelah peserta didik mengikuti pengabdian selama 2 (tahun) di luar wilayah Papua, mereka diwajibkan kembali ke Papua dan bersedia dikaryakan selama 2 (dua) tahun di instansi-instansi yang disesuaikan dengan jurusan atau bidang keahlian. Pengkaryaan ini dilakukan dengan pengawasan dan monitoring-evaluasi yang ketat dari ketua kita. Peserta didik tidak dapat memilih sendiri wilayah dan tempat pengkaryaan, melainkan telah disediakan berdasarkan assesment keahlian peserta didik dan kebutuhan di masing-masing daerah yang akan dituju sebagai tempat pengkaryaan.

Dari program pendidikan berkelanjutan tersebut diatas maka dapat dianalisa bahwa ;

- 1) Bila dihitung akan mencapai waktu selama 20 tahun, tentunya bila dimulai dari tahun 2025 maka pada tahun 2045 akan tercipta bibit unggul SDM yang unggul.
- 2) Dari sejumlah 100 orang tiap tahun tiap provinsi Papua

dengan keahlian/kemampuan yang berbeda, maka setiap dinas dari provinsi tersebut akan diawaki oleh SDM yang unggul.

3) Program berkelanjutan maka akan terus mengalir tiap tahun sejumlah 100 SDM unggul tiap provinsi.

4) Selama proses pendidikan berkelanjutan doktrinasi tentang NKRI akan terus berlanjut dan Masyarakat Papua akan betul betul merasakan pemerataan Pembangunan SDM yang seimbang dan setara dengan provinsi lainnya.

Sehingga dari rangkaian proses tersebut maka Papua akan siap dengan SDM yang unggul dan berjuang bagi daerahnya masing-masing serta Papua siap menuju Indonesia Emas 2045.

3) Kepentingan untuk masyarakat Lokal.

Masyarakat lokal dengan ekologi wilayah yang beraneka ragam, kondisinya sebagian besar sangat jauh dengan pusat perkotaan. Semua fasilitas yang tersedia di *Boarding School* ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat baik dari segi fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas rekreasi dan hiburan serta fasilitas rohani yang layak dan terawasi.

Salah satu yang menjadi penarik simpati masyarakat yang dilakukan oleh LSM/NGO di Papua adalah cepatnya LSM/NGO dalam mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah terpencil. Tentunya dengan keberadaan *Boarding School* ini maka simpati masyarakat bisa direbut dan timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4) Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pengajar yang aman dari gangguan.

Salah satu tantangan dan pekerjaan rumah terbesar di Papua adalah tersedianya tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang berkualitas. Bahkan saking kurangnya tenaga pengajar serta tenaga

kesehatan di Papua, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sampai harus turut mengisi kekosongan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan di sana. Kondisi ini sangat berbanding terbalik apabila dibandingkan dengan di luar pulau Papua, misalnya di Pulau Jawa yang bisa dikatakan sarjana pendidikan dan tenaga kesehatan sangat berlimpah.

Di antara faktor yang menyebabkan kurangnya tenaga pengajar dan tenaga kesehatan di Papua adalah karena rendahnya SDM dan ancaman keamanan yang masih terus menjadi momok bagi tenaga-tenaga profesional untuk mengabdikan diri di Papua. Berbagai berita di media masa tentang dibunuhnya tenaga pengajar dan tenaga kesehatan serta sekolah-sekolah dan institusi kesehatan yang dibakar, memberikan rasa takut bagi putra putri Bangsa untuk mengabdikan diri di Papua. Hal ini perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah, agar mampu memastikan ketersediaan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang berkualitas.

Pemerintah dapat memberikan 3 (tiga) tawaran kepada putra-putri terbaik Bangsa untuk mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar dan tenaga kesehatan di Papua, yaitu: *pertama*, imbalan jasa atau gaji dan bonus yang menjanjikan, *kedua*, kesempatan dan prioritas peningkatan karir atau keistimewaan setelah selesai melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar dan tenaga kesehatan di Papua, dan *ketiga*, memastikan jaminan keamanan bagi setiap tenaga pengajar dan tenaga kesehatan di Papua, misalnya dengan menempatkan personil TNI-Polri yang terukur di institusi-institusi pendidikan, kesehatan dan rumah-rumah dinas para tenaga pengajar dan tenaga kesehatan di daerah-daerah rawan.

4) Tersedianya Kondisi Keamanan yang kondusif.

Dalam teori Hankam dijelaskan bahwa negara menjamin keamanan warga negaranya. *Boarding School* dalam konsep ini diawasi dan diamankan oleh aparat TNI/Polri yang bersifat mengelilingi dalam radius keamanan yang terjamin. Posisi ini secara

tidak langsung dapat mengamankan setiap lini pusat pendidikan di wilayah. Hal ini akan menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif sehingga menimbulkan suatu rasa percaya diri dari seluruh personel yang berada dalam lembaga pendidikan tersebut.

Rendahnya kondisi pendidikan dan kesehatan dari masyarakat Papua salah satunya adalah minimnya tenaga guru dan tenaga kesehatan yang takut berada di wilayah Papua khususnya pedalaman.

5) Berdampak terhadap pertumbuhan masyarakat dan terciptanya peluang ekonomi yang sehat.

b. Peningkatan Kualitas Kesehatan.

Kesehatan merupakan bagian dari indikator Sosial Budaya, dalam ekologi masyarakat Papua yang sangat beragam kondisi saat ini cukup memperhatikan. Fasilitas kesehatan yang memang sudah terbangun saat ini tersebar dalam bentuk Puskesmas dengan minimnya tenaga kesehatan. Melalui lembaga pendidikan yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan maka fasilitas kesehatan yang ada dalam setiap *Boarding Scholl* di tiap wilayah provinsi Papua dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Hal yang menjadi penguatan dalam peningkatan kualitas kesehatan dalam bentuk :

1) Program Kesehatan Berbasis Wilayah dan Kearifan Lokal

Pemerintah berupaya mengembangkan program kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua. Misalnya, pelayanan kesehatan di daerah pedalaman yang sulit dijangkau dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah, seperti melalui pos-pos kesehatan keliling dan tenaga kesehatan yang dilatih khusus untuk bekerja di lingkungan yang beragam.

2) Pembangunan Infrastruktur Kesehatan.

Pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik di berbagai daerah di Papua menjadi prioritas. Selain itu, pembangunan sarana transportasi dan komunikasi juga ditingkatkan untuk memudahkan akses ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah-

daerah terpencil.

3) Peningkatan Tenaga Kesehatan. Salah satu tantangan utama di Papua adalah kurangnya tenaga medis yang kompeten. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berusaha menambah jumlah tenaga kesehatan melalui program penempatan dokter, perawat, dan bidan ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, program pendidikan kesehatan juga diperkuat agar lebih banyak tenaga medis lokal yang bisa berkontribusi.

4) Program Jaminan Kesehatan. Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan di Papua juga berperan penting dalam memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat. Meskipun demikian, masih ada kendala terkait kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat program ini.

5) Pendekatan Kultural dan Komunitas. Untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program-program kesehatan, pendekatan berbasis komunitas dan kultural diutamakan. Ini termasuk melibatkan tokoh adat dan agama dalam kampanye kesehatan, serta menggunakan bahasa lokal dalam penyuluhan.

6) Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan kesehatan dan program pemberian gizi dilakukan untuk menekan angka malnutrisi dan *stunting* yang masih tinggi di Papua. Selain itu, pendidikan kesehatan bagi ibu dan anak juga menjadi fokus utama.

7) Penggunaan Teknologi Digital. Penggunaan teknologi digital dan telemedicine mulai diterapkan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses. Aplikasi berbasis kesehatan dan konsultasi jarak jauh dengan dokter menjadi solusi dalam memberikan pelayanan kesehatan secara lebih efisien.

Meskipun sudah ada berbagai upaya dan program, tantangan dalam peningkatan kualitas kesehatan di Papua tetap besar. Tingkat kesehatan masyarakat Papua masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, dan peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan pendekatan

holistik yang melibatkan semua aspek, dari infrastruktur hingga pendekatan sosial budaya

c. Penguatan Spritual dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Dalam teori Sosial Budaya dijelaskan bahwa setiap kebudayaan memiliki cara bertindak dan berfikir yang berdasarkan pengalaman dasar dan tidak terlepas dari individu masyarakat. Masyarakat Papua yang terkenal dengan tingkat Spritual yang cukup taat dalam menunaikan kepercayaannya didukung dengan sistem kepemimpinan yang cukup baik melalui adat, maka dengan adanya perhatian pemerintah yang terfokus kepada pendekatan sosial budaya diharapkan dapat merebut simpati masyarakat. Hal ini sangat tergantung dengan adanya :

1) Penyesuaian DOB dengan Kondisi Sosial-Budaya

Pemekaran dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah tanah Papua yang semula hanya Provinsi Papua kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta terbaru ada 3 (tiga) DOB yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, berpijak pada penggolongan 7 (tujuh) wilayah adat peninggalan zaman kolonial. Hal ini perlu dievaluasi kembali agar tidak terjadi penggabungan wilayah-wilayah adat yang berbeda secara struktur sosial maupun zona ekologi, termasuk pemisahan wilayah-wilayah adat tertentu dari kelompok wilayah adat yang memiliki kesamaan struktur sosial dan zona ekologisnya.

Sejauh ini upaya-upaya pembangunan tanah Papua lewat pembentukan DOB menuai kritik sebab dianggap kurang memperhatikan sosial budaya masyarakat Papua yang berakibat pada tidak maksimalnya indentifikasi kekuatan dan kendala kultural yang terjadi di masyarakat Papua, serta persepsi yang terbangun kurang tepat tentang bagaimana masyarakat yang baik dan benar berdasarkan sosial budaya Papua. Padahal untuk dapat membangun masyarakat Papua ke arah yang lebih maju dan sejahtera diperlukan dua hal mendasar tersebut: identifikasi yang benar dan persepsi yang

tepat.

Merujuk tulisan J.R Mansoben berjudul "*Karakter Orang Papua dalam Perspektif Sosio Kultural*" yang dipublikasikan *World Resources Institute (WRI) Indonesia*, bahwa sebelum membangun suatu masyarakat -khususnya dalam hal ini masyarakat Papua- terlebih dahulu harus dikenal secara baik siapa dan bagaimana karakteristik masyarakat tersebut. Hal ini misalnya: *pertama*, dengan memahami bagaimana sosio kultural masyarakat Papua, sehingga dapat diidentifikasi kekuatan dan kendala kultural apa saja yang terjadi di masyarakat Papua; *kedua*, melalui pengetahuan tentang bagaimana masyarakat yang baik dan benar, agar dapat membantu melakukan berbagai kebijakan dan program untuk membangun masyarakat Papua menuju masyarakat sejahtera dan maju.

Papua sebagai suatu wilayah yang dihuni banyak Klan/Marga dan sub-sub klan, serta Kampung dan Etnik atau suku bangsa, tidak hanya memiliki kekayaan kebudayaan yang sangat beragam sebagai identitas bagi masing-masing kesatuan sosial yang ada, melainkan juga memiliki keanekaragaman sistem politik atau sistem kepemimpinan tradisional yang unik dan khas dari masing-masing kesatuan sosial tersebut. Hal ini perlu dipahami untuk mengetahui bagaimana tipe politik dari setiap kesatuan sosial yang ada di Papua, cara yang mereka tempuh untuk mendapatkan kursi kepemimpinan, serta mengidentifikasi siapa saja dan bagaimana *stakeholder* di masing-masing kesatuan sosial menjalankan perannya.

Empat sistem kepemimpinan yang dipraktikkan dalam kebudayaan Papua, mempengaruhi karakteristik masyarakatnya, serta model hubungan komunitas dalam kesatuan -kesatuan sosial yang ada. Sehingga berbagai upaya yang dimaksudkan untuk melakukan pembangunan atas wilayah Papua, sudah seharusnya memahami betul kondisi struktur sosial yang terbangun secara beragam di Papua. Setidaknya, pemerintah dapat memahami siapa saja *stakeholders* pada masing-masing kesatuan sosial di Papua, sehingga upaya-upaya pemberdayaan dan pembangunan Papua

dapat dilakukan dengan melibatkan para *stakeholders* yang ada.

Selain sistem kepemimpinan, dua bentuk hak kepemilikan tanah dalam sosial-budaya Papua juga sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh para pemangku kebijakan atau siapa pun yang terlibat dalam usaha-usaha pembangunan Papua, agar kearifan lokal dan hak-hak adat tiap-tiap kesatuan sosial di Papua tidak dirampas atau dikesampingkan. Sebab bagaimana pun, tanah, kekayaan alam dan keanekaragaman sosial budaya di Papua merupakan identitas dan jati diri Orang Asli Papua yang wajib dihargai, dihormati, dilestarikan dan dikembangkan. Membangun Papua bukan berarti memisahkan orang Papua dari identitas dan jati dirinya, melainkan dengan menguatkan identitas mereka dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki.

Selain itu, pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu kesatuan sosial masyarakat berdasarkan lingkuan ekologi, merupakan hal yang amat penting, sebab lingkungan ekologi sangat berkait erat dengan pola-pola adaptasi suatu kesatuan sosial masyarakat. Kebudayaan suatu kesatuan sosial masyarakat, baik yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sumber penghidupan, kepercayaan, kesenian, pemerintahan dan lain sebagainya adalah cerminan dari pola-pola adaptasi yang dianut kesatuan sosial masyarakat tersebut. Strategi pembangunan di Papua seharusnya memperhatikan pola-pola adaptasi masyarakat Papua berdasarkan lingkungan ekologi. Termasuk misalnya program-program pemberdayaan di bidang ekonomi, tidak boleh mengabaikan kondisi lingkungan ekologis masing-masing wilayah, sebab dengan mempertimbangkan lingkungan ekologis masyarakat setempat, akan diperoleh data yang valid dan akurat tentang potensi asli masyarakat lokal yang potensial untuk dikembangkan.

Papua harus dibangun berdasarkan kearifan lokalnya, dengan mengangkat dan mengembangkan sosial-budayanya. Pembangunan yang mengesampingkan sosial-budaya masyarakat setempat, hanya akan menghasilkan program-program yang tidak pernah tuntas, atau

bahkan alih-alih menyelesaikan masalah justru menghasilkan masalah baru, seperti marginalisasi masyarakat asli Papua dan membuat masyarakat Papua kehilangan identitas serta jati dirinya.

Persoalan selanjutnya adalah pembagian wilayah-wilayah Papua dalam DOB seharusnya merujuk pada latar belakang apa? Dalam Taskap ini penulis menawarkan tesis bahwa DOB yang dibentuk berdasarkan kategorisasi 7 (tujuh) wilayah adat warisan Belanda sudah tidak relevan, pun DOB apabila dibentuk berdasarkan kategorisasi Etnik atau Suku Bangsa, tentu akan melahirkan banyak sekali DOB yang menyebabkan kerumitan dan tantangan tersendiri, sebab Suku Bangsa di wilayah Papua jumlahnya tidak sedikit, misalnya ada Etnik Mooi, Sentani, Lani, Maybrat, Asmat, Biak, Waropen, Marind, Anim, Wamesa, dan lain-lain. Namun benang merah dari berbagai Etnik yang sangat banyak itu, dapat dikelompokkan berdasarkan teritorial atau zona ekologi.

DOB dapat dibentuk berdasarkan kategorisasi 4 (empat) Zona Ekologi Papua, yakni Lingkungan ekologi rawa (*swampy areas*), pantai dan muara sungai (*coastal and riverine*), Lingkungan ekologi dataran rendah pantai (*coastal lowland areas*), Lingkungan ekologi kaki-kaki gunung dan lembah-lembah kecil (*foothills and small valleys*) dan Lingkungan ekologi pegunungan tinggi (*highland*). Sebab sosial-budaya suatu kesatuan sosial masyarakat, baik yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sumber penghidupan, kepercayaan, kesenian, pemerintahan dan lain sebagainya adalah cerminan dari pola-pola adaptasi yang dianut kesatuan sosial masyarakat tersebut berdasarkan Zona Ekologinya.

2) **Menguatkan Peran MRP**

Merujuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, peran Majelis Rakyat Papua (MRP) sangat penting bagi perlindungan hak-hak Orang Asli Papua. MRP itu sendiri adalah representasi kultural masyarakat

Papua (*Vide*, Pasal 1 angka 8). Namun diskursus yang berkembang sejauh ini, khususnya dengan diberlakukannya Otsus jilid II dan pembentukan DOB, kewenangan MRP dianggap dikebiri oleh pemerintah pusat, sebab dalam hal pembentukan regulasi-regulasi terbaru tentang pembangunan wilayah Papua lewat kebijakan Otsus, ada kesan bahwa MRP dilangkahi oleh pemerintah pusat.

Terlepas dari isu dan diskursus tersebut, melihat keragaman sosial-budaya Papua yang berakar pada struktur sosial dan zona ekologinya yang sangat kaya dan unik, peran MRP tentu diperlukan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pembangunan di Papua. Tesis yang dibangun dalam Taskap ini, menyodorkan gagasan agar pendekatan sosial-budaya menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan dalam berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk membangun tanah Papua.

Konsekuensi dari pendekatan sosial-budaya, para pemangku kebijakan dan pihak-pihak terkait harus memiliki identifikasi yang benar dan persepsi tepat tentang Papua. Pada poin itulah, kehadiran MRP diperlukan untuk menjembatani proses identifikasi dan persepsi tersebut. MRP berfungsi menjembatani kebingungan dan ketidakfahaman terhadap kebudayaan Papua. Sehingga produk-produk kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjamin hak-hak adat dan hak-hak asasi Orang Asli Papua.

Keanggotaan MRP itu sendiri, diambil dari pimpinan atau perwakilan dari kelompok Etnik atau kelompok sosial di bawahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang ada di masing-masing Daerah Otonomi. Selain itu tugas dan wewenang MRP harus diberikan sebagaimana amanat Undang-Undang tanpa dikebiri dengan dalih dan alasan apapun. Kepada setiap individu dalam MRP harus dibekali kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga kehadirannya dapat memberikan dampak yang berarti bagi perjuangan hak-hak Orang Asli Papua.

3) **Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyerapan Anggaran**

Salah satu diskursus yang menjadi pembicaraan dalam kajian tentang pembangunan Papua adalah tidak tampak perbandingan yang wajar antara besarnya kekayaan alam Papua dan anggaran pembangunan yang digelontorkan untuk Papua dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Sehingga perlu ada evaluasi menyeluruh, bukan hanya pada nilai dana yang dikeluarkan, tetapi juga akar masalah yang menjadi sebab dari semua permasalahan di Papua.

Di samping itu, pemerintah pusat selain memberikan dana Otsus, juga wajib melakukan monitoring dan pengawasan secara sungguh-sungguh agar dana Otsus benar-benar dapat terserap sesuai peruntukannya, sehingga mampu terkonversikan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua secara signifikan. Sementara itu pemerintah daerah di wilayah Papua harus dipastikan memiliki kompetensi dan kapasitas dalam mengelola dana Otsus yang sedemikian besar. Sehingga keduanya -pemerintah pusat dan pemerintah daerah- harus saling bersinergi dan berkolaborasi secara baik dan sehat untuk mewujudkan Papua yang sejahtera.

Monitoring dan Evaluasi dari Pemerintah Pusat terhadap penyerapan anggaran harus bersifat aktif, bukan saja pasca pemanfaatan anggaran, namun pra pencairan dengan memastikan *stakeholders* atau pelaksana dan penanggungjawab di tingkat Pemerintah Daerah benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola serta mendistribusikan anggaran kepada program-program pembangunan Papua.

Praktik korupsi dan sikap oportunistik elit-elit di Daerah perlu ditindak secara tegas agar anggaran pembangunan tidak dinikmati segelintir orang. Pemerintah Pusat juga harus tegas dan konsisten dalam membangun Papua, salah satunya dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara jujur, tegas dan transparan.

Pada konteks Papua yang dalam berbagai data BPS

menunjukkan tingkat kesejahteraan yang rendah. Hal ini menjadi PR besar apabila hendak mewujudkan target 2045 tersebut, namun bukan berarti mustahil, hanya saja membutuhkan usaha dan kemauan yang tidak kecil. Apabila alternatif penyelesaian masalah Papua dengan menggunakan pendekatan sosial-budaya dapat memenuhi indikator kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan BPS, yaitu indikator kualitas SDM, kependudukan, kesehatan dan gizi, kemiskinan dan meminimalisir ancaman keamanan, bukan tidak mungkin target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

Hal paling mendasar yang diperlukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan di Papua adalah dengan menyiapkan secara sungguh-sungguh kader-kader dan tokoh-tokoh pembangunan Papua di masa depan yang *melek* dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sering berkembangnya zaman yang telah memasuki fase disrupsi akibat revolusi industri yang menghendaki penyesuaian-penyesuaian yang tepat dan cepat terhadap loncatan teknologi informasi, mau tidak mau mewajibkan tiap-tiap individu untuk mengetahui dan terbiasa serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Tesis yang ditawarkan dalam Taskap ini berkenaan dengan penyiapan generasi emas atau bibit unggul Papua di masa depan adalah dengan membangun institusi dan ekosistem pendidikan yang modern dan terintegrasi-interkoneksi untuk putra-putri asli Papua dengan membentuk *Boarding School* terpadu dan terintegrasi-interkoneksi yang dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai pengabdian pada daerah-daerah di seluruh wilayah Papua. Adapun *Boarding School* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Melalui revitalisasi pendekatan sosial budaya tersebut diatas maka target Indonesia Emas 2045 yang merupakan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2025-2045, adalah proyek besar Republik Indonesia yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana tidak, pada tahun 2045 Indonesia ditargetkan menjadi negara maju, modern dan menjadi salah satu negara

adidaya di dunia. Negara maju, negara modern dan negara adi daya adalah istilah yang memiliki definisi berbeda, serta suatu negara baru dapat dikategorikan dengan tiga istilah tersebut apabila telah mencapai indikator-indikator tertentu.

Suatu negara dikatakan negara maju apabila terdapat beberapa karakteristik berikut: *pertama*, infrastruktur yang maju, sebab pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat didukung oleh infrastruktur yang kuat, di antara seperti transportasi, telekomunikasi, listrik, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya; *kedua*, pelayanan kesehatan yang berkualitas, sebab negara maju memiliki fasilitas kesehatan yang mumpuni dan setiap masyarakatnya memiliki akses yang mudah terhadap fasilitas-fasilitas tersebut; *ketiga*, stabilitas politik dan hukum, sebab dalam negara maju dibutuhkan suasana yang kondusif bagi proses industri, investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; *keempat*, diversifikasi ekonomi, sebab pada negara maju tidak bergantung ada sektor ekonomi tunggal, melainkan sangat beragam dan umumnya memiliki sektor industri yang kuat; *kelima*, layanan publik yang baik, sebab pada negara maju setiap warga negara memiliki akses yang baik dan mudah pada fasilitas pelayanan publik yang disediakan oleh negara.

Negara berkembang baru dapat dikategorikan negara maju, apabila telah terpenuhi beberapa indikator, yaitu: memiliki pendapatan perkapita yang tinggi (berkaitan dengan daya beli masyarakatnya), tingkat pengangguran rendah (berkaitan dengan tingkat pertumbuhan penduduk serta ketersediaan lapangan pekerjaan), tingkat penduduk miskin rendah (berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya), menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, dan harapan hidup tinggi serta kesehatan yang baik.

Sedangkan negara modern merupakan istilah yang merujuk kepada negara hukum (*rechtstaat*), yaitu suatu negara yang menjadikan hukum sebagai dasar bernegara dan menjalankan negara. Suatu negara dapat disebut negara hukum apabila terpenuhi 10 (sepuluh) pilar negara hukum, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before of law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ negara independen dan saling mengendalikan, adanya peradilan tata usaha negara (*constitutional adjudication*), adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, dan bersifat demokratis (*democratic rule of law/democratische rechtsstaat*).⁴¹

⁴¹ BPHN, *Naskah Akademik RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan*

Adapun negara adidaya biasanya disebut juga negara adikuasa, merupakan negara yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang lebih dominan dalam percaturan politik internasional. Negara adidaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi negara lainnya baik dari segi politik, ekonomi, hukum dan lain sebagainya, serta memiliki pengaruh besar dalam proyek-proyek internasional. Sehingga dengan sendirinya, negara adidaya sering diposisikan sebagai pemimpin global.

Berdasarkan definisi di atas, maka untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 bukan suatu perkara mudah, melainkan proyek besar yang membutuhkan pikiran-pikiran besar, kemauan dan hati yang besar, usaha yang besar, *political will* pemerintah yang tidak kerdil, serta pengorbanan yang tidak kecil. Pemerintah Republik Indonesia sendiri, telah merumuskan beberapa pilar yang harus dicapai untuk mewujudkan target 2045 tersebut, yaitu unggulnya Sumber Daya Manusia (SDM), demokrasi yang sehat, pemerintahan yang baik dan terwujudnya keadilan sosial. Tentu ke-empat pilar ini bukan hanya harus ditegakkan di salah satu pulau atau provinsi saja, melainkan di semua provinsi yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi-Provinsi di wilayah Papua sebagaimana yang menjadi fokus bahasan dalam Taskap ini. Konsekuensi legisnya atau dalam bahasa yang lain, setiap provinsi harus sudah mencapai indikator-indikator sebagai daerah dengan masyarakatnya yang sejahtera agar target Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

Pada konteks Papua yang dalam berbagai data BPS yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, menunjukkan tingkat kesejahteraan yang rendah. Hal ini menjadi PR besar apabila hendak mewujudkan target 2045 tersebut, namun bukan berarti mustahil, hanya saja membutuhkan usaha dan kemauan yang tidak kecil. Apabila alternatif penyelesaian masalah Papua, yang dalam hal ini adalah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya untuk memenuhi indikator kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan BPS, yaitu indikator kualitas SDM, kependudukan, kesehatan dan gizi, kemiskinan dan meminimalisir ancaman keamanan, bukan tidak mungkin target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.



16. Kesimpulan

Dari analisa dalam BAB III berdasarkan data dalam BAB II, diperoleh kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan kajian dalam BAB I terkait revitalisasi pendekatan sosial budaya dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua guna menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa pembangunan yang dilakukan di Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia masih belum maksimal menggunakan pendekatan sosial budaya sebagai alternatif. Hal ini

akhirnya berdampak pada dampak pembangunan yang lambat dan tidak signifikan. Selain itu, ancaman disintegrasi masih belum dapat diselesaikan, hal ini dikarenakan semangat nasionalisme yang terkikis oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kesejahteraan, Hak Asasi Manusia, Marjinalisasi dan lain sebagainya. Maka untuk menyelesaikan masalah Papua, dapat dimulai dengan merevitalisasi pendekatan sosial-budaya, mencari hulu dari isu disintegrasi serta menghilangkan marjinalisasi di tanah Papua.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pembangunan Papua dengan pendekatan Sosial Budaya, dapat dilihat dalam empat hal, yaitu ancaman, kelemahan, peluang dan kekuatan. Ancaman dalam pembangunan Papua di antaranya adalah faktor keamanan yang tidak stabil, adanya ekspansi kapital, marjinalisasi Orang Asli Papua dan terus terjadi pelanggaran HAM. Adapun kelemahan yang membuat pembangunan dengan pendekatan sosial budaya menjadi terhambat adalah karena SDM yang rendah, Akses Distribusi Kurang Memadai dan Krisis Nasionalisme.

Adapun faktor pendorong pembangunan Papua dengan pendekatan sosial budaya dapat dilihat dari aspek peluang yang terdiri dari adanya potensi SDA, potensi kebudayaan Papua dan geostrategis wilayah Papua. Selain itu aspek kekuatan yang dapat mendorong pembangunan Papua dengan pendekatan sosial budaya antara lain adanya kebijakan otonomi khusus dan adanya berbagai peraturan dan regulasi yang menjadi jalan bagi segala kebijakan untuk membangun Papua secara berkelanjutan.

Ada beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk membangun Papua dengan pendekatan Sosial-Budaya, yaitu *pertama*, Penyiapan Infrastruktur Lembaga Pendidikan/Latihan Terintegrasi. Dengan adanya suatu lembaga pendidikan/latihan yang terintegrasi yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang komplit dan dapat dijadikan sebagai lembaga latihan serta pengembangan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga hal ini sangat berguna bagi kepentingan Pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan ASN nya, menciptakan generasi penerus yang berkualitas serta dapat melayani kebutuhan masyarakat setempat yang cukup jauh dari pusat perkotaan. Fasilitas ini yang dilengkapi dengan unsur keamanan

TNI/Polri secara melingkar akan dapat menumbuhkan rasa aman dari seluruh personel yang ada dalam lembaga tersebut terutama tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang selama ini enggan berada di wilayah Papua. *Kedua*, Peningkatan Fasilitas Kesehatan melalui sarana yang dimiliki oleh *Boarding School* dengan Program Kesehatan Berbasis Wilayah dan Kearifan Lokal, Pembangunan Infrastruktur Kesehatan. Peningkatan Tenaga Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan. Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan di Papua juga berperan penting dalam memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat. Meskipun demikian, masih ada kendala terkait kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat program ini. Pendekatan Kultural dan Komunitas. Pemberdayaan Masyarakat serta Penggunaan Teknologi Digital. *Ketiga*, Penguatan Spritual dalam menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat regulasi pembangunan Papua yang sesuai dengan kearifan lokal atau kebudayaan Papua, penyesuaian DOB dengan kondisi sosial-budaya, menguatkan peran MRP, memaksimalkan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran.

17. Rekomendasi

Merevitalisasi pendekatan sosial budaya untuk membangun Papua menjadi lebih baik, diperlukan *political will* dan kesungguhan segenap para pemangku kebijakan seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong-royong memberikan sumbangsih sesuai dengan perannya masing-masing demi kemajuan Papua khususnya dan Republik Indonesia secara umum. Namun secara khusus rekomendasi ini diberikan kepada K/L terkait untuk mengimplementasikan pembangunan Papua sebagai berikut:

- a. **Menteri Komunikasi dan Informasi** menindaklanjuti laju perkembangan revolusi industri 4.0 yang meniscayakan kehadiran internet sebagai penunjang aktivitas digital masyarakat, dengan menyediakan dan mencukupi infrastruktur dan jaringan internet di wilayah Papua, sehingga program-program peningkatan kualitas SDM di Papua dapat berjalan secara baik, serta upaya untuk mendokumentasikan serta mengangkat kebudayaan Papua agar dikenal seluruh Indonesia dan dunia menjadi lebih mudah;
- b. **Menteri Keuangan** mengevaluasi dan menindaklanjuti penyerapan

anggaran pembangunan Papua, serta mempertimbangkan pagu anggaran bidang pendidikan khusus bagi putra-putri Papua dalam skema program *Boarding School*, hal ini diperlukan agar betul-betul anggaran pembangunan Papua dapat dimaksimalkan sebaik mungkin untuk menyiapkan generasi-generasi emas calon pemimpin masa depan dari tanah Papua;

c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi dan menindaklanjuti program kurikulum khusus bagi putra-putri Papua dalam skema program *Boarding School*, serta menindaklanjuti tawaran program tersebut secara serius dan mendalam sebagai upaya terbaik negara untuk memfasilitasi proses kaderisasi dan persiapan melahirkan generasi-generasi emas dari tanah Papua.

Jakarta, 15 Agustus 2024
Peserta PPRA LXVI

KOLONEL INF. MUSMULYADI Z., S.IP.
NO PESERTA : 063

